

**PENGARUH AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN, DAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN TERHADAP AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
(Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA)  
Kabupaten Deli Serdang)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**RITA AGUSTINA PASARIBU**  
**NIM: 0502162084**

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

**PENGARUH AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN, DAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN TERHADAP AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
(Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Deli  
Serdang)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelara Sarjana (S1) Pada Jurusan Akuntansi Syariah  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN  
Sumatera Utara*



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rita Agustina Pasaribu  
NIM : 0502162084  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 18 Agustus 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Bunga Wijaya Kesuma gg. Bersama no. 7. Padang  
Bulan Selayang II

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang)”**. benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, Februari 2021

Yang membuat pernyataan

Materai

6000

Rita Agustina Pasaribu

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul:

**PENGARUH AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN, DAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN TERHADAP AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
(Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Deli  
Serdang)**

Oleh:

Rita Agustina Pasaribu

NIM. 0502162084

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)  
Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, Februari 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

**M. Irwan Padli Nasution, MM, M.Kom**  
**NIDN. 2013027501**

**Rahmat Daim Harahap, M.Ak**  
**NIDN. 0126099001**

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah

**Hj. Dr. Yeni Samri Julianti Nasution, S.HI, M.A**  
**NIDN. 2001077903**

## ABSTRAK

**Rita Agustina Pasaribu, 2021.** Pengaruh *Aksesibilitas* Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap *Akuntabilitas* Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang). Di bawah bimbingan Pembimbing Skripsi I oleh Bapak Muhammad Irwan Padli Nasution, MM, M.Kom dan Pembimbing Skripsi II oleh Bapak Rahmat Daim Harahap, M.Ak.

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan melaporkan pertanggungjawaban serta mengungkapkan segala aktivitas atau kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di BPKA. Kab. Deli Serdang. Metode analisis yang digunakan adalah kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 52 orang dengan teknik sampel jenuh. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dimana aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem pengendalian intern sebagai variable independen dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai variable dependen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh sebesar 16,023 dengan tingkat signifikan yang di peroleh sebesar 0,00 terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan sistem pengendalian intern secara parsial berpengaruh sebesar 5,752 dengan tingkat signifikan 0,000 terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian intern secara simultan berpengaruh sebesar 176,317 dengan tingkat signifikan 0,000 terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan hasil koefisien determinasi ( $R^2$ ) pengaruh aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di BPKA. Kab. Deli Serdang sebesar 87,8%. Sedang sisanya 12,2% Akuntabilitas Laporan Keuangan di BPKA. Kab. Deli Serdang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**Kata Kunci:** Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

## ABSTRACT

**Rita Agustina Pasaribu, 2021.** The Effect of Financial Report Accessibility and Internal Control System on Regional Financial Management Accountability (Study at the Financial and Asset Management Agency of Deli Serdang Regency). Under the guidance of Thesis I Supervisor by Mr. Muhammad Irwan Padli Nasution, MM, M.Kom and Thesis Advisor II by Mr. Rahmat Daim Harahap, M.Ak.

Accountability is the obligation of the trustee (government) to provide accountability, present and report accountability and disclose all activities or activities that are their responsibility to the trustee (community). The purpose of this study was to determine how the influence of the accessibility of financial reports and the internal control system on the accountability of regional financial management in BPKA. Deli Serdang. The analytical method used is quantitative. Population in study 52 people with a saturated sample technique. Methods used in this reseach with multiple linear regression, accessibility of financial reports and the internal control system are the independent variables and the accountability of regional financial management is the dependent variable. The results of this study indicate that partially the accessibility of financial reports has an effect of 16,023 with a significant level of 0.000 on the accountability of regional financial management, and that partially the internal control system has an effect of 5,752 with a significant level of 0.000 on the accountability of regional financial management, and that simultaneously the accessibility of financial reports and the internal control system simultaneously has an effect of 176,317 with a significant level of 0.000 on the accountability of regional financial management. Next results of the coefficient of determination ( $R^2$ ) influence the accessibility of financial reports and the internal control system on the accountability of regional financial management at BPKA. Deli Serdang to 87.8%. the rest 12.2% Financial Statement Accountability at BPKA. Deli Serdang is influenced by other variables that were not examined in this study.

**Keywords:** Accessibility of Financial Statements, Internal Control System, Accountability of Regional Financial Management

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan berupa Iman, Islam dan juga kesehatan serta kekuatan kepada penulis, walaupun dengan langkah tertatih-tatih namun dengan penuh keyakinan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sembari dengan senantiasa berdo'a semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberkahi-Nya. Selanjutnya shalawat dan salam disampaikan kepada Rasul Al-Amin Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam yang telah membawa risalah Islam berupa ajaran yang hak lagi sempurna bagi manusia dan seluruh penghuni alam ini.

Untuk melengkapi tugas-tugas perkuliahan dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, maka penulis menyusun skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang).”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat adanya bimbingan dan motivasi serta bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan maupun hambatan, namun berkat adanya bantuan dari berbagai pihak dan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka segala kesulitan dan hambatan tersebut dapat penulis hadapi sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Melalui kata pengantar ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih terkhusus kepada orangtua saya tercinta yang sudah membesarkan saya dari kecil hingga sekarang yaitu ayahanda Abdi Efendi dan ibunda Mariati yang selalu menjadi motivasi dan inspirasi serta semangat terbesar penulis untuk terus melangkah dan melupakan lelah demi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.

Untuk itu melalui kata pengantar ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
3. Bapak Hendra Harmain, SE, M.Pd selaku Pembimbing Akademik saya yang tak pernah lelah memberikan semangat, memberikan masukan, bimbingan, arahan dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama proses penyelesaian tugas akhir.
4. Bapak Muhammad Irwan Padli Nasution, MM, M.Kom selaku Pembimbing Skripsi I Saya yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan, arahan dan saran-saran yang baik mulai awal perkuliahan sampai penyelesaian proposal dan juga skripsi ini. Terima kasih atas kesabarannya dalam membimbing penulis selama ini, semoga amal kebaikan Bapak dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
5. Bapak Rahmat Daim Harahap, M.Ak selaku Pembimbing Skripsi II Saya yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan, arahan dan saran-saran yang baik mulai awal perkuliahan sampai penyelesaian proposal dan juga skripsi ini. Terima kasih atas kesabarannya dalam membimbing penulis selama ini, semoga amal kebaikan Bapak dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
6. Bapak Hendra Harmain, SE, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah pada saat Saya mengajukan judul skripsi. Terima kasih atas kesabarannya dalam mendidik dan menasehati penulis selama berada diperkuliahan.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang tidak dapat penulis sebutkan namanya, terima kasih atas warisan ilmu dan curahan pengetahuan yang secara ikhlas telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada penulis selama di bangku perkuliahan.
8. Terkhusus untuk orang tua tersayang Bapak Makmur pasaribu dan Mama Sri Purwanti, serta kakak saya tersayang Mayani Pratiwi Pasaribu dan juga Sahabat terbaik saya Bagus Ridho Ansari . Sebagai salah satu penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



9. Keluarga besar Akuntansi Syariah angkatan 2016 terkhusus kelas B yang selama ini telah berjuang bersama selama masa perkuliahan, yang telah memberikan semangat, motivasi dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman KKN Kelompok 48 Desa Ujung, Karo, terima kasih atas kesan dan pesan selama 1 bulan kebersamaan menyelesaikan satu dari 3 tri darma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang mendukung serta banyak membantu penulis mengumpulkan data dan informasi untuk penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis panjatkan do'a agar seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, semoga atas bantuan dan amal baiknya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun penulis berikutnya, dan juga pembaca dimasa yang akan datang. Sekali lagi penulis ucapkan ribuan terima kasih.

Medan, Februari 2021

Penulis

**Rita Agustina Pasaribu**  
**NIM. 0502162084**

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi Masalah</b> .....	<b>9</b>
<b>C. Batasan Masalah</b> .....	<b>9</b>
<b>D. Rumusan Masalah</b> .....	<b>10</b>
<b>E. Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....	<b>10</b>
<b>1. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>10</b>
<b>2. Kegunaan Penelitian</b> .....	<b>11</b>
<b>BAB II. LANDASAN TEORI</b> .....	<b>12</b>
<b>A. Kajian Teoritis</b> .....	<b>12</b>
<b>1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</b> .....	<b>12</b>
a) Landasan Akuntabilitas Menurut Islam.....	<b>14</b>
<b>2. Aksesibilitas Laporan Keuangan</b> .....	<b>17</b>
a) Landasan Aksesibilitas Laporan Keuangan Menurut Islam .....	<b>20</b>
b) Hubungan Aksesibilitas laporan keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah .....	<b>21</b>
<b>3. Sistem Pengendalian Intern</b> .....	<b>22</b>
a) Landasan Sistem Pengendalian Intern Menurut Islam.....	<b>25</b>
b) Hubungan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas	

Pengelolaan Keuangan Daerah.....	27
<b>B. Kajian Terdahulu .....</b>	<b>29</b>
<b>C. Kerangka Teoritis.....</b>	<b>30</b>
<b>D. Hipotesis Penelitian .....</b>	<b>33</b>
<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
<b>A. Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>35</b>
<b>B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian .....</b>	<b>35</b>
1. Lokasi Penelitian .....	35
2. Waktu Penelitian .....	35
<b>C. Jenis Penelitian dan Sumber Data Penelitian .....</b>	<b>36</b>
1. Jenis Penelitian .....	36
2. Sumber Data Penelitian .....	36
<b>D. Populasi dan Sampel Penelitian .....</b>	<b>36</b>
1. Populasi.....	36
2. Sampel.....	38
<b>E. Definisi Operasional.....</b>	<b>38</b>
1. Variabel Bebas (Independent Variable) .....	38
2. Variabel Terikat (Dependent Variable) .....	40
<b>F. Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>42</b>
1. Kuisisioner.....	42
<b>G. Teknik Analisis Data.....</b>	<b>43</b>
<b>1. Uji Instrumen Penelitian.....</b>	<b>43</b>
a. Uji Validitas Kuisisioner .....	43
b. Uji Reliabilitas Kuisisioner .....	44
<b>2. Uji Asumsi Klasik .....</b>	<b>45</b>
a. Uji Normalis .....	45
b. Uji Multikolinieritas .....	46
c. Uji Heterokedastisitas.....	47
<b>3. Analisis Regresi Linear Berganda .....</b>	<b>47</b>

4. Uji Hipotesis.....	48
a. Uji t (Pengujian Hipotesis Secara Parsial.....)	48
b. Uji F (Pengujian Hipotesis Secara Simultan .....	49
c. Kofesien Determinasi ( $R^2$ ) .....	49
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
<b>A. Hasil Penelitian.....</b>	<b>51</b>
1. <b>Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset</b> <b>Daerah Kabupaten Deli Serdang.....</b>	<b>51</b>
<b>B. Hasil Uji Instrumen Penelitian.....</b>	<b>52</b>
1. <b>Uji Validitas dan Reliabilitas Kuisisioner .....</b>	<b>52</b>
2. <b>Aksesibilitas Laporan Keuangan (<math>X_1</math>) .....</b>	<b>53</b>
3. <b>Sistem Pengendalian Intern (<math>X_2</math>) .....</b>	<b>54</b>
4. <b>Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) .....</b>	<b>55</b>
<b>C. Analisis Deskriptif .....</b>	<b>57</b>
1. <b>Deskripsi Variabel Akuntabilitas Laporan Keuangan (Y) .....</b>	<b>58</b>
2. <b>Deskripsi Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (<math>X_1</math>) .....</b>	<b>61</b>
3. <b>Deskripsi Variabel Sistem Pengendalian Intern (<math>X_2</math>) .....</b>	<b>64</b>
<b>D. Hasil Uji Asumsi Klasik .....</b>	<b>67</b>
1. <b>Uji Normalitas.....</b>	<b>67</b>
2. <b>Uji Multikolinearitas .....</b>	<b>70</b>
3. <b>Uji Heterokedastisitas .....</b>	<b>70</b>
<b>E. Analisis Data Hasil Penelitian.....</b>	<b>71</b>
1. <b>Perhitungan Regresi Linear Berganda .....</b>	<b>71</b>
<b>F. Pengujian Hipotesis.....</b>	<b>73</b>
1. <b>Pengujian Hipotesis Parsial (Uji – t) .....</b>	<b>73</b>
a. <b>Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan (<math>X_1</math>) terhadap</b> <b>Akuntabilitas Laporan Keuangan (Y) .....</b>	<b>74</b>
b. <b>Pengaruh sistem Pengendalian Intern (<math>X_2</math>) terhadap</b> <b>Akuntabilitas Laporan Keuangan (Y) .....</b>	<b>74</b>

2. Pengujian Hipotesis Parsial (Uji – F) .....	75
G. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	76
H. Pembahasan Penelitian .....	76
1. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan .....	77
2. Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan.....	78
3. Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pengujian.....	79
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	<b>82</b>
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>90</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>121</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1. Opini BPK atas LKPD Kabupaten Deli Serdang.....	6
2.1. Indikator Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).....	16
2.2. Indikator Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan .....	21
2.3. Indikator Variabel Sistem Pengendalian Intern .....	27
2.4. Penelitian yang Relevan .....	29
3.1. Jadwal Penelitian.....	35
3.2. Populasi Penelitian Variabel Sistem Pengendalian Intern (X <sub>2</sub> ) dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) .....	37
3.3. Defenisi Operasional Variabel Bebas (X <sub>1</sub> ) .....	39
3.4. Defenisi Operasional Variabel Terikat (X <sub>2</sub> ) .....	39
3.5. Defenisi Operasional Variabel Terikat (Y) .....	40
4.1. Hasil Uji Validitas Kuisisioner Aksesibilitas Laporan Keuangan (X <sub>1</sub> ) .....	53
4.2. Hasil Uji Reliabilitas Kuisisioner Aksesibilitas Laporan Keuangan (X <sub>1</sub> ) .....	54
4.3. Hasil Uji Validitas Kuisisioner Sistem Pengendalian Intern (X <sub>2</sub> ) .....	54
4.4. Hasil Uji Reliabilitas Kuisisioner sistem Pengendalian Intern (X <sub>2</sub> ) .....	55
4.5. Hasil Uji Validitas Kuisisioner Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) .....	56
4.6. Hasil Uji Reliabilitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) .....	56
4.7. Kategori Penilaian .....	58
4.8. Distribusi Frekuensi Akuntabilitas Laporan Keuangan (Y) .....	59
4.9. Distribusi Frekuensi Aksesibilitas Laporan Keuangan (X <sub>1</sub> ) .....	62
4.10. Distribusi Frekuensi Sistem Pengendalian Intern (X <sub>2</sub> ) .....	65
4.11. Hasil Uji Normalitas <i>Kolmogorov – Smirnov</i> .....	68

4.12. Hasil Uji Multikolinearitas .....	70
4.13. Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	72
4.14. Hasil Uji Parsial (Uji-t) .....	73
4.15. Hasil Uji Simultan (Uji-F).....	75
4.16. Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	76

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
2.1. Kerangka Berpikir .....	33
4.1 Hasil Uji Normalitas Histogram Residual .....	69
4.2 Hasil Uji Normalitas <i>Probability Plot</i> .....	69
4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas Scatterplot .....	71



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hal
1. Kuisisioner .....	90
2. Hasil Output Uji Validitas Aksesibilitas Laporan Keuangan.....	93
3. Hasil Output Uji Validitas Sistem Pengendalian Intern .....	94
4. Hasil Output Uji Validitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah .....	95
5. Hasil Output Uji Reliabilitas Aksesibilitas Laporan Keuangan .....	96
6. Hasil Output Uji Reliabilitas Sistem Pengendalian Intern .....	97
7. Hasil Output Uji Reliabilitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah .....	98
8. Rekapitulasi Data Kuisisioner Aksesibilitas Laporan Keuangan ( $X_1$ ).....	99
9. Rekapitulasi Data Kuisisioner Sistem Pengendalian Intern ( $X_2$ ) .....	101
10. Rekapitulasi Data Kuisisioner Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	103
11. Hasil Uji Normalitas <i>Kolmogorov-Smirnov</i> .....	105
12. Hasil Uji Normalitas Histogram Residual.....	106
13. Hasil Uji Normalitas <i>Probability Plot</i> .....	107
14. Hasil Uji Multikolinieritas .....	108
15. Hasil Uji Heterokedastisitas <i>Scatterplot</i> .....	109
16. Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	110
17. Hasil Uji Parsial (Uji-t) .....	111
18. Lampiran Uji Simultan (Uji-F) .....	112
19. Hasil Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ ) .....	113
20. Dokumentasi Penelitian.....	114

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Adanya kebijakan desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, menyebabkan adanya pelimpahan wewenang dalam komposisi pengeluaran anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi saat ini, tuntutan masyarakat atas pertanggungjawaban pemerintah dalam memberikan informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak publik meningkat. Hal ini mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab (*akuntability*) dalam setiap kebijakan, tindakan, dan kinerjanya.

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan melaporkan pertanggungjawaban serta mengungkapkan segala aktivitas atau kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban mengenai integrasi

keuangan dan ketaatan terhadap undang-undang<sup>1</sup>.

Dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan maka harus diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Faktor pertama Aksesibilitas laporan keuangan. Aksesibilitas Laporan Keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan berhak mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah, penggunaan informasi keuangan yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami yaitu dapat dilakukan dengan efisien melalui media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi dan *website* (internet) pemerintah.<sup>2</sup>

Pernyataan ini di dukung oleh Mustofa aksesibilitas merupakan proses pengungkapan laporan keuangan untuk dapat dikonsumsi oleh publik<sup>3</sup>. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Dan sejalan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 9 ayat 4 tahun 2008 yang berisi tentang kewajiban bagi setiap badan publik untuk menyebarluaskan informasi keuangan secara berkala, disampaikan dengan cara yang mudah

---

<sup>1</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Edisi Pertama Penerbit Andi, 2010) h.20

<sup>2</sup> Fauziyah, Miftahul Reza, *Pengaruh Penyajian dan aksesibilitas Laporan keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (6), 2017), h.1-16

<sup>3</sup> Mustofa, Anies Iqbal, *Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang*, (Accounting Analysis Journal, 1(1), 2012), h.1-6

dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah no.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan, meliputi: 1. Laporan realisasi anggaran, 2. Neraca, 3. Laporan arus kas, dan 4. Catatan atas laporan keuangan.

Pemerintah harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Demi terciptanya hal itu pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik. Pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Namun yang terjadi sampai saat ini tidak adanya keterbukaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset kab. Deli Serdang kepada masyarakat atas pertanggung jawaban hasil laporan keuangan yang telah dilaksanakan baik melalui media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi maupun *website* (internet) pemerintah, yang terlampir dalam website resmi BPKA Kab. Deli Serdang hanya laporan APBD PEMKAB Deli Serdang yang isinya hanya ringkasan APBD sehingga sesuai amanat dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 9 ayat 4 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah no.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan, sehingga menimbulkan kecurigaan di lingkungan masyarakat.

Hal ini di perkuat dari hasil wawancara penulis dengan pimpinan BPKA Kab. Deli Serdang, bahwa laporan keuangan yang di publikasikan di website resmi BPKA Kab. Deli Serdang hanya laporan APBD PEMKAB Deli Serdang yang isinya hanya ringkasan APBD kab. Deli Serdang secara umum. Namun untuk laporan keuangan khusus BPKA Kab. Deli Serdang tidak di publikasikan, karena menurut pimpinan BPKA Kab. Deli Serdang dengan hanya melampirkan laporan keuangan laporan APBD PEMKAB Deli Serdang sudah cukup, dan tidak adanya sosialisasi instansi yang terkait secara langsung kepada masyarakat yang terkait mengenai penjelasan laporan keuangan yang dihasilkan. Sehingga yang terjadi tidak sesuai dengan sejalan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 9 ayat 4 tahun 2008 yang berisi tentang kewajiban bagi setiap badan publik untuk menyebarluaskan informasi keuangan secara berkala, disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Faktor lainnya yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Sistem Pengendalian Intern. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dengan tidak

adanya keterbukaan laporan keuangan BPKA kab. Deli Serdang kepada masyarakat baik melalui media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi maupun *website* (internet) pemerintah mengindikasikan adanya permasalahan intern karena tidak adanya tata pemerintahan yang baik.

Pengendalian intern akuntansi dirancang untuk memberikan keyakinan akan transaksi-transaksi apa yang dilakukan sesuai dengan kewenangannya. Mencatat transaksi dapat memudahkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi atau kriteria yang ditentukan yang sesuai dengan tujuan laporan tersebut<sup>4</sup>. Sehingga dengan adanya penerapan sistem pengendalian intern yang baik dan benar akan menjamin terwujudnya penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi yang tepat di masing-masing SKPD.

Menurut PP No. 60 Tahun 2008<sup>5</sup>, Sistem Pengendalian Intern memiliki beberapa elemen penting dalam pengelolaan suatu akuntabilitas daerah, elemen-elemen tersebut adalah lingkungan pengendalian, resiko pengendalian, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi. Lebih lanjut, unsur sistem pengendalian intern berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan

---

<sup>4</sup> Primayana , *Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Manfaat Teknologi Informasi, Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng)*. (E-Jurnal S1 AK Universitas Pendidikan Ganesha, 2(1), 2014) h.1-12.

<sup>5</sup> Asfiryati, D, *Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel intervening (studi pada SKPD Kota Dumai)*. (JOM Fekon, Vol.4 No.1, 2017)

sistem pengendalian intern.

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Menurut UU No. 15 Tahun 2004<sup>6</sup>, opini adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria sebagai berikut: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Berikut data Opini BPK atas LKPD Kabupaten Deli Serdang.

**Tabel 1.1**

Opini BPK atas LKPD Kabupaten Deli Serdang.

Entitas	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Deli Serdang	TW	TMP	WDP	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP

Sumber: BPK, RI

Dari tabel 1 diatas, opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Deli Serdang dari tahun 2012-2019 mengalami fluktuatif, tahun 2012 mendapat opini Tidak Wajar (TW) menjadi Tidak Memberikan Pendapat (TMP) di tahun 2013 dan meningkat menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di tahun 2014. Namun turun lagi di tahun 2015 menjadi TMP, dikarenakan adanya sistem pengendalian intern yang tidak berjalan baik. Kemudian di tahun 2016 meningkat menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), bertahan di opini yang sama di tahun 2017 dan meningkat kembali di tahun 2018 dan

<sup>6</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 *tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*

2019 yang menandakan adanya perbaikan akuntabilitas penyajian laporan serta sistem pengendalian intern keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku di pemerintah kabupaten Deli Serdang. Namun dari hasil tersebut belum diketahui apakah Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Deli Serdang secara khusus dalam akuntabilitas dan transparansi penyajian laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Berdasarkan hal ini penulis melakukan wawancara dengan pimpinan Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kab. Deli Serdang, dan memberikan hasil ketidaktransparansinya laporan keuangan BPKA Kab. Deli Serdang dikarenakan pimpinan kurang menerapkan pengendalian intern dan manajemen terhadap resiko di lingkungan kerja, dan kurangnya pengawasan kinerja terhadap pegawai BPKA khususnya di bagian pencatatan akuntansi keuangan. Sehingga ada kekhawatiran pimpinan dalam mempublikasikan laporan keuangan khusus BPKA kab. Deli Serdang kepada masyarakat.

Selain adanya *fenomena gap* pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, penelitian ini juga dilakukan karena adanya *riset gap* pada penelitian-penelitian terdahulu. Jika pemerintah dapat meningkatkan aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian intern maka akan meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini karena adanya transparansi dan akuntabilitas maka masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah



tentunya dapat melakukan pengawasan dengan lebih leluasa. Sehingga hal ini akan memaksa pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan secara jujur dan akurat. Hasil penelitian Mulyana (2006) membuktikan secara empiris bahwa aksesibilitas berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun berbeda dengan penelitian Azizah (2014) yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi tetapi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kemudian melihat dari penelitian sebelumnya, Superdi dan Sari menemukan bahwa Aksesibilitas, Sistem akuntansi keuangan daerah dan Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Sedangkan Asfiryati menemukan bahwa Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan Penyajian laporan keuangan, berpengaruh tidak langsung terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui sistem pengendalian intern sebagai mediasi atau variabel intervening.

Penelitian sebelumnya ditemukan bahwa tidak konsistennya masalah penelitian mengenai pengaruh Aksesibilitas laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dari hasil penelitian terdahulu. Dan tidak adanya peneliti yang melakukan penelitian ketiga variable secara bersamaan dan melakukan studi ini di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang. Sehingga ini yang menjadi alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah penulis mengangkat permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang)”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Tidak adanya keterbukaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset kab. Deli Serdang kepada masyarakat, yang terlampir dalam website resmi BPKA Kab. Deli Serdang hanya laporan APBD PEMKAB Deli Serdang.
2. Kurangnya pimpinan BPKA Kab. Deli Serdang melakukan pengendalian intern dan manajemen terhadap resiko di lingkungan kerja, dan kurangnya pengawasan kinerja terhadap pegawai BPKA khususnya di bagian pencatatan akuntansi keuangan.
3. Adanya ketidakkonsistenan atas hasil penelitian terdahulu pada variabel sistem pengendalian intern dan aksesibilitas laporan keuangan.

## **C. Batasan Masalah**

Peneliti memberikan batasan masalah agar penelitian ini lebih terfokus. Topik ini dibatasi berkaitan Keterbukaan dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di BPKA Kab. Deli Serdang.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di BPKA. Kab. Deli Serdang?
2. Apakah Sistem pengendalian intern berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di BPKA. Kab. Deli Serdang?
3. Apakah Aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian intern berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di BPKA. Kab. Deli Serdang?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti secara empiris Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di BPKA. Kab. Deli Serdang.
- b. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti secara empiris sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di BPKA. Kab. Deli Serdang.

- c. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti secara empiris Aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian intern secara simultan berpengaruh signifikan terhadap terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di BPKA. Kab. Deli Serdang.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Bagi Peneliti

Dapat menambah dan mengembangkan wawasan peneliti khususnya tentang akuntansi sektor publik. Serta dapat melakukan *link and match* antara teori yang diperoleh dengan praktik akuntansi.

### b. Bagi BPKA di kabupaten Deli Serdang

Memberikan informasi dan masukan sebagai salah satu bahan pertimbangan kepala BPKA kabupaten Deli Serdang dalam memahami manfaat Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah. Sehingga dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan yang didapatkan dari hasil survei di BPKA Deli Serdang.

### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teoritis

##### 1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut<sup>7</sup>.

Menurut LAN dalam Akuntabilitas dan *Good Governance*<sup>8</sup>, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah daerah. Instrumen utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah anggaran pemerintah daerah, data yang secara periodik dipublikasikan, laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh *agent* yang independen. Anggaran tahunan

---

<sup>7</sup> Halim, Abdul, “*Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*”, Jakarta: Salemba Empat, 2006.

<sup>8</sup> LAN, “*Akuntabilitas dan Good Governance*”, Jakarta: Erlangga, 2000.

secara khusus mempunyai otoritas legal untuk pengeluaran dana publik, sehingga proses penganggaran secara keseluruhan menjadi relevan untuk manajemen fiskal dan untuk melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pengendalian pada berbagai tingkat operasi<sup>9</sup>.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 (Pasal 1)<sup>10</sup>, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Bila dilihat dari ruang lingkupnya, keuangan daerah meliputi kekayaan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pengurusannya. Kekayaan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah meliputi APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan kekayaan daerah yang dipisahkan pengurusannya meliputi badan-badan usaha milik daerah<sup>11</sup>.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur.

---

<sup>9</sup> Shende Suresh dan Tony Bennet, "*Concept Paper 2: Transparency and Accountability in Public Financial Administration*", UN DESA, 2004.

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

<sup>11</sup> Halim, Abdul, "*kuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*" Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007.

## Landasan Akuntabilitas Menurut Islam

### Q.S Al. Anfal: 7

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemah Arti: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

### Q.S Al-Baqaroh: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْحْسٍ مِنْهُ شَيْءًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemah Arti: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan

dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu “menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Skala likert merupakan skala pengukuran yang sudah menyatakan peringkat antar tingkatan yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap objek atau kejadian tertentu. Variabel ini, menggunakan skala likert. Skala likert merupakan skala pengukuran yang sudah menyatakan peringkat antar tingkatan yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap objek atau kejadian tertentu. Variabel ini, menggunakan kuesioner yang terdiri dari 10 item pernyataan dan menggunakan skala likert dan memberikan skor dari jawaban responden yakni : (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral atau kurang setuju, (4) setuju, dan (5) sangat setuju.



Indikator variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y) dalam penelitian ini mengacu pada aspek penelitian yang telah dilakukan oleh Wahyuni,dkk yaitu:

**Tabel 2.1 Indikator variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y)**

Variabel	Sumber	Indikator	Sumber data
Aksesibilitas Laporan Keuangan	Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2003) bahwa akuntabilitas dapat diindikasikan dari hal berikut (dalam Aliyah dan Nahar, 2012 <sup>12</sup> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku bagi stakeholders.</li> <li>2. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku.</li> <li>3. Adanya mekanisme yang menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi.</li> <li>4. Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.</li> <li>5. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan,</li> </ol>	Pimpinan dan Pegawai

<sup>12</sup> Aliyah, Siti dan Aida Nahar, 2012, "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara, *Jurnal Akuntansi & Auditing*", Volume 8/No. 2/Mei 2012: 97-189

		<p>melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal.</p> <p>6. Terdapat akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.</p> <p>7. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai pemerintah.</p> <p>8. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.</p>	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## 2. Aksesibilitas Laporan Keuangan

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan<sup>13</sup>. Laporan keuangan harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya<sup>14</sup>.

Menurut Mardiasmo<sup>15</sup>, laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep

<sup>13</sup> Mulyana, Budi, "Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah", Jurnal Akuntansi Pemerintah, 2006.

<sup>14</sup> Henley, D. A, Likierman. J. Perrin, M. Svans, I. Lapsley, & J. Whiteoak, "Public Sector Accounting and Financial Control Fourth Edition", Chapman & Hall, 1992.

<sup>15</sup> Mardiasmo, "Akuntansi Sektor Publik", Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2002.

pertanggungjawaban public. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (*accountability dan stewardship*).

Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan *website* (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat<sup>16</sup>.

Menurut Yani<sup>17</sup>, pemerintah selaku perumus dan pelaksana kebijakan APBN berkewajiban untuk terbuka dan bertanggungjawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komperhensif kepada masyarakat luas termasuk informasi keuangan daerah. Dengan kemajuan teknologi yang pesat serta potensi

---

<sup>16</sup> Shende, Suresh dan Tony Bennet, "*Concept Paper 2: Transparency and Accountability in Public Financial Administration*", UN DESA, 2004.

<sup>17</sup> Yani, Ahmad, "*Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan memberdayakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). SIKD adalah sistem informasi terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat<sup>18</sup>.

Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet atau cara lainnya<sup>19</sup>. Dengan demikian pemerintah daerah harus memenuhi: 1) Keterbukaan yaitu laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa 2) Kemudahan yaitu pemerintah daerah harus memberikan kemudahan kepada *stakeholder* dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah, 3) *Accesible* yaitu masyarakat dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet (*website*).

Sebagai konsekuensinya penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari akuntabilitas keuangan daerah. Pemerintah harus mampu memberikan kemudahan akses

---

<sup>18</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

<sup>19</sup> Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola dana publik

20.

## Landasan Aksesibilitas Laporan Keuangan Menurut Islam

### Q.S An-Nisa : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemah Arti: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Variabel aksesibilitas laporan keuangan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala likert. Skala likert merupakan skala pengukuran yang sudah menyatakan peringkat antar tingkatan yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap objek atau kejadian tertentu. Variabel ini, menggunakan kuesioner, ada 10 item pernyataan dan skor dari jawaban responden yakni: (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, 4) setuju, dan (5) sangat setuju. Indikator variabel aksesibilitas laporan keuangan (X1) dalam penelitian ini mengacu pada aspek penelitian yang telah dilakukan oleh Wahyuni,dkk:

<sup>20</sup> Sande, P, “Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (studi empiris pada pemerintah provinsi sumatra barat)”, Artikel Skripsi. Universitas Negeri Padang, Padang: 2013.

**Tabel 2.2. Indikator variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan**

Variabel	Sumber	Indikator	Sumber data
Aksesibilitas Laporan Keuangan	Sande (2013)	1. Laporan keuangan dapat diakses 2. Laporan keuangan dipublikasikan melalui media umum	Pimpinan dan Pegawai

### **Hubungan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar<sup>21</sup>. Penelitian Mulyana<sup>22</sup> menyatakan bahwa aksesibilitas berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah, dimana semakin mudah masyarakat umum dan pihak-pihak lainnya dalam mengakses laporan keuangan suatu SKPD menunjukkan bahwa instansi yang bersangkutan telah menerapkan transparansi. Penelitian Mulyana menyatakan bahwa aksesibilitas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin baik aksesibilitas laporan keuangan sebuah

<sup>21</sup> Rohman, Abdul, 2009, *Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 9 No. 1. Universitas Diponegoro Semarang

<sup>22</sup> Mulyana, Budi. (2006). *Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*”, Jurnal Akuntansi Pemerintah.

SKPD maka akan semakin baik akuntabilitas laporan keuangan instansi tersebut. Hal ini karena jika suatu SKPD membuat laporan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik maka instansi tersebut memberikan keleluasaan bagi pihak-pihak yang ingin mengakses laporan pertanggung jawaban yang dibuatnya.

### **3. Sistem Pengendalian Intern**

Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan dengan informasi yang berkualitas agar dapat dimengerti oleh para penggunanya termasuk masyarakat karena masyarakat memiliki hak dasar untuk tahu (*basic right to know*) dan memperoleh informasi mengenai apa yang sedang dilakukan pemerintah, dan mengapa suatu kebijakan atau program dilakukan serta bagaimana organisasi menjalankan operasionalnya. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, harus ada pengendalian internal yang efektif dari pemerintah itu sendiri, dan pemerintah juga harus mampu mengendalikan tekanan eksternal yang dapat mengganggu stabilitas penyusunan laporan keuangan. Pengendalian internal adalah mutlak diperlukan untuk menjamin arah yang sesuai dengan pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Menurut Mardiasmo<sup>23</sup> sistem akuntansi yang lemah menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Pengendalian intern adalah rencana organisasi dan metode

---

<sup>23</sup> Mardiasmo, "Akuntansi Sektor Publik", Yogyakarta: C.V ANDI, 2009.

yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen<sup>24</sup>.

Pengendalian intern merupakan salah satu fondasi terkuat *good governance*. Sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi pemerintah, dan menjamin pengamanan aset Negara<sup>25</sup>.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008<sup>26</sup> pemerintah menetapkan adanya suatu sistem pengendalian intern yang harus dilaksanakan, baik pada tingkat pemerintah pusat ataupun daerah. Sistem pengendalian intern dimaksud adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien, serta pelaporan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

---

<sup>24</sup> Krismiaji, “*Sistem Informasi Akuntansi*”, In Edisi keempat, 2015.

<sup>25</sup> Purnomo, D. A. B. dan B. S. (2014). “*Pengaruh sistem pengendalian intern dan kekuatan koersif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi pada PEmerintah Daerah Kabupaten/ Kota di wilayah I Bogor Provinsi Jawa Barat)*”, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, Vol.2, 2014, hlmn 276–288.

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. “*Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*”.



Unsur SPIP yang terdapat dalam PP No.60 Tahun 2008 mengadaptasi konsep COSO (Bab II Ps.3), meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian, yaitu pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan yang kondusif terhadap pengendalian yang sehat, melalui:
  - a) Penegakan integritas dan nilai etika
  - b) Komitmen terhadap kompetensi
  - c) Kepemimpinan yang kondusif
  - d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
  - e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
  - f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
  - g) Pewujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
  - h) Hubungan keja yang baik dengan instansi pemerintah terkait
2. Penilaian risiko, yakni pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang terdiri atas:
  - Identifikasi risiko
  - Analisis risiko
3. Kegiatan pengendalian, sekurang- kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:
  - Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah
  - Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko
  - Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah
  - Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
  - Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
  - Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk

memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

4. Informasi dan Komunikasi, untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
- Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.
- Pemantauan, dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

Meskipun pengendalian intern telah dibuat dan diaplikasikan oleh suatu instansi pemerintahan tetapi pada dasarnya pengendalian intern memiliki keterbatasan.

### Landasan Sistem Pengendalian Intern Menurut Islam

#### Q.S Al-Mujaadillah: 7

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۗ ثُمَّ يُنذِرُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemah Arti: Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan

Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

### Q.S Al-Ashr: 3

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّاصَوْا بِالصَّبْرِ

Terjemah Arti: kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.

### Q.S Al-Balad: 17

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَّاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَّاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ

Terjemah Arti: Dan dia (tidak pula) termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.

Variabel Sistem Pengendalian Intern dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Skala likert merupakan skala pengukuran yang sudah menyatakan peringkat antar tingkatan yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap objek atau kejadian tertentu. Variabel ini, menggunakan kuesioner yang terdiri dari 10 item pernyataan dan menggunakan skala likert dan memberikan skor dari jawaban responden yakni : (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral atau kurang setuju, (4) setuju, dan (5) sangat setuju. Indikator variabel Sistem Pengendalian Intern (X2) pada penelitian ini mengacu pada aspek dalam PP No.60 Tahun 2008 yaitu:

**Tabel 2.3. Indikator variabel Sistem Pengendalian Intern**

Variabel	Sumber	Indikator	Sumber data
Sistem Pengendalian Intern	Xu, et al. (2003) dan dikembangkan oleh Choirunisah (2008) <sup>27</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Integritas data</li> <li>2. Ketepatan input dan posting data</li> <li>3. Prosedur otorisasi dokumen transaksi</li> <li>4. Tersimpannya dokumen sumber data</li> <li>5. Pembagian tanggungjawab</li> <li>6. Penentuan kebijakan dan standar akuntansi</li> <li>7. Implementasi kebijakan dan standar</li> </ol>	Pimpinan dan Pegawai

### **Hubungan Sistem Pengendalian Intern terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Masih ditemukan penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK, BPK memberikan opini “tidak wajar dan/atau disclaimer” diantaranya disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait. (Badan Pemeriksa Keuangan<sup>28</sup>). Indriasari<sup>29</sup> dan Winidyaningrum dan Rahmawati<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Choirunisah, Fariziah. 2008. “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Yang Dihasilkan Sistem Akuntansi Instansi (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Malang Tahun 2008)*”. <http://www.google.com>.

<sup>28</sup> <http://www.bpkriau.go.id>, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Kabupaten Indragiri Hulu

<sup>29</sup> Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo. 2008. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Illir)*. Kumpulan Makalah Simposium Nasional Akuntansi XI. 23-24 Juli.

membuktikan secara empiris bahwa pengendalian internal akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dengan ketepatan waktu dan keterandalan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Susanti. Nugraha dan Susanti<sup>31</sup> menyatakan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap transparansi, dimana semakin baik sistem pengendalian intern yang diterapkan pada suatu instansi pemerintah maka akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan karena dalam penerapan sistem pengendalian intern yang baik, akan menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi-operasi pemerintah. Indriasari dan Winidyaningrum dan Rahmawati membuktikan secara empiris bahwa pengendalian internal akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dengan ketepatan waktu dan keterandalan.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Susanti. Nugraha dan Susanti menyatakan sistem pengendalian intern

---

<sup>30</sup> Winidyaningrum, C., dan Rahmawati. 2010. *Pengaruh Sumberdaya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian, Intern Akuntansi*. SNA XIII Purwokerto

<sup>31</sup> Nugraha, Darya Setya dan Apriyanti Susanti, 2010, *The Influence of Internal Control System to The Reliability of Local Government Financial Statement (Case Study at Pemerintah Provinsi Jawa Barat)*, Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi, Vol. 2 No. 2

berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dapat terwujud apabila setiap instansi menerapkan sistem pengendalian intern yang tepat. Hal ini karena dalam sistem pengendalian intern, suatu instansi diharuskan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel yaitu dapat dipertanggungjawabkan.

## B. Kajian Terdahulu

**Tabel 2.4**  
**Daftar Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti/ Tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	Superdi, (2017)	Pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan Keuangan daerah (studi empiris pada satuan kerja Perangkat daerah kabupaten sijunjung)	Analisis regresi linier berganda	Penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Keuangan daerah
2.	Embun Widya Sari, (2017)	Pengaruh sistem pengendalian intern, penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan gaya kepemimpinan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di kabupaten indragiri hulu.	Analisis regresi linier berganda	Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Aksesibilitas berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, sedangkan penyajian laporan keuangan dan Gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap transparansi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3.	Miftahul Reza Fauziya dan Nur Handayani, (2017)	Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.	Analisis regresi linier berganda	Penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
4.	Nurlaili, (2016)	Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (studi pada skpd kabupaten bengkalis)	Analisis regresi linier berganda	Pengaruh penyajian keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas penelolan keuangan daerah
5.	Charli Andreas Saragih, 2015	Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	Analisis regresi linier berganda	Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
6.	Muhammad Ichlas, Hasan Basri, Muhammad Arfan, (2014)	Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern pemerintah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah kota banda aceh.	Analisis Regresi Linear Berganda	Standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern pemerintah dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh.

### C. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah suatu kerangka konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Dalam penelitian ini penulis

menggunakan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai variabel terikat, dan menggunakan Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Intern sebagai variabel bebas.

Tujuan yang ingin dicapai Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah Kab. Deli Serdang adalah dapat terwujudnya pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur.

Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut<sup>32</sup>. Maka indikator utama dalam menentukan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah yaitu Keterbukaan pertanggung jawaban laporan keuangan suatu badan, sehingga aksesibilitas laporan keuangan di anggap faktor terpenting dalam menentukan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh

---

<sup>32</sup> Halim, Abdul, “ *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*”, Jakarta: Salemba Empat, 2006.



informasi mengenai laporan keuangan suatu badan atau perusahaan. Pemerintah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola dana publik<sup>33</sup>.

Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Untuk pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, sangat dibutuhkan sistem pengendalian intern yang baik. Sistem pengendalian intern merupakan manajemen yang terkordinir dengan baik untuk menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi pemerintah, dan menjamin pengamanan aset Negara<sup>34</sup>.

Hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dapat diartikan bahwa meningkatnya Aksesibilitas laporan keuangan dan

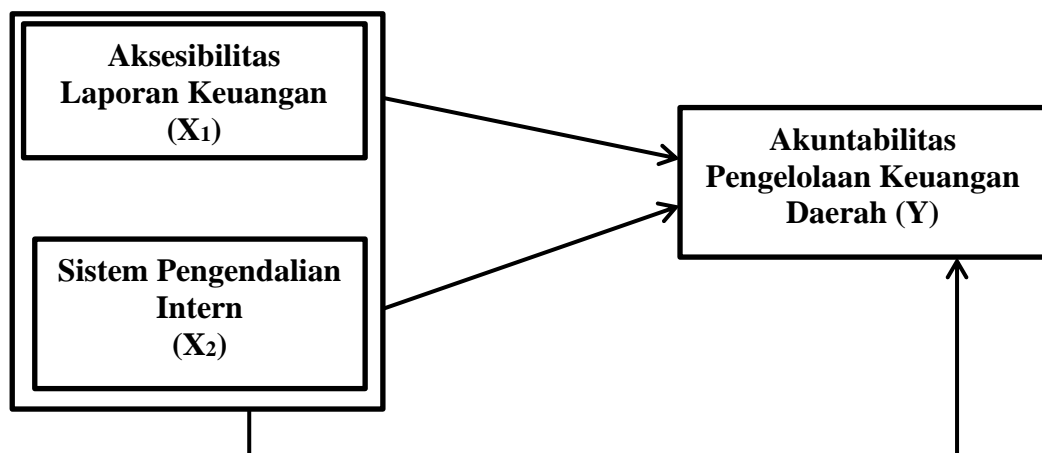
---

<sup>33</sup> Sande, P, “*Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (studi empiris pada pemerintah provinsi sumatra barat)*”, Artikel Skripsi. Universitas Negeri Padang, Padang: 2013.

<sup>34</sup> Purnomo, D. A. B. dan B. S. (2014). “*Pengaruh sistem pengendalian intern dan kekuatan koersif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi pada PEmerintah Daerah Kabupaten/ Kota di wilayah I Bogor Provinsi Jawa Barat)*”, Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, Vol.2, 2014, hlmn 276–288.

diikuti dengan meningkatnya Sistem pengendalian intern, maka secara teori dapat meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah. Karena diasumsikan bahwa badan pemerintahan yang memiliki laporan pertanggung jawaban keuangan yang baik, jujur, tidak ada yang ditutupi&dirahasiakan dari masyarakat, serta pengelolaan manajemen intern yang baik. Maka akan berdampak baik pula terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah di BPKA. Kab. Deli Serdang.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kerangka teoritis pada penelitian ini dapat diilustrasikan pada bagan berikut:



**Gambar 2.1.**  
**Kerangka Berfikir**

#### **D. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian yang harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan uraian teori dan kerangka berpikir tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H1: Aksesibilitas Laporan Keuangan secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di BPKA Kab. Deli Serdang
- H2: Sistem Pengendalian Intern memiliki secara parsial pengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- H3: Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif. Sedangkan, data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu berupa data yang berasal dari penyebaran kuisisioner kepada responden. Menurut Sugiyono<sup>35</sup> metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada fenomena atau gejala untuk meneliti suatu populasi dengan menggunakan instrumen-instrumen tertentu dengan analisis data bersifat statistik.

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Deli Serdang, yang beralamat di Jalan Mawar No. 8, Deli Serdang, Sumatera Utara.

##### 2. Waktu Penelitian

**Tabel 3.1. Jadwal Penelitian**

No.	Kegiatan	Bulan							
		Juni	Juli	Agust	Sept	Oktober	Nov	Des	Jan
		2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021
1	Pengajuan Judul								
2	Pra Riset								
3	Penyusunan Proposal								
4	Bimbingan Proposal								
5	Seminar Proposal								
6	Riset								
7	Bimbingan Skripsi								
8	Sidang Munaqasah								

<sup>35</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, Bandung : Alfabeta, 2015.

## **C. Jenis dan Sumber Data Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada fenomena atau gejala untuk meneliti suatu populasi dengan menggunakan instrumen-instrumen tertentu dengan analisis data bersifat statistik.

### **2. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang digunakan yaitu data primer. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data ini dikumpulkan peneliti secara khusus berupa data yang berasal dari penyebaran kuisisioner kepada responden.

## **D. Populasi dan Sampel Penelitian**

### **1. Populasi**

Populasi adalah jumlah keseluruhan obyek/ subyek yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Maka populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 52 orang, untuk lebih jelasnya tentang populasi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2**  
**Populasi Penelitian variabel Sistem Pengendalian Intern (X2) dan**  
**Akuntabilitas Pengelolaan keuangan daerah (Y)**

No	Nama	Jumlah
1.	Kepala BPKA	1
2.	Sekretaris BPKA	1
3.	Kasubag Umum	1
4.	Staf Kasubag Umum	3
5.	Kasubbag Program	1
6.	Kasubbag Keuangan	1
7.	Bendahara Pengeluaran	1
8.	Bendahara PPKD	1
9.	Staf Bendahara PPKD	1
10.	Kabid. Anggaran	1
11.	Kasubbid Penyusunan Anggaran	1
12.	Staf Kasubbid Penyusunan Anggaran	2
13.	Kasubbid Pengendalian Anggaran	1
14.	Staf Kasubbid Pengendalian Anggaran	2
15.	Kabid Perbendaharaan	1
16.	Kasubbid Gaji Pegawai	1
17.	Staf Kasubbid Gaji Pegawai	4
18.	Kasubbid Kas Daerah	1
19.	Staf Kasubbid Kas Daerah	14
20.	Kabid. Akuntansi	1
21.	Kasubbid Pembukuan	1
22.	Staf Kasubbid Pembukuan	1
23.	Kasubbid Evaluasi dan Pelaporan	1
24.	Staf Kasubbid Evaluasi dan Pelaporan	2
25.	Kabid. Aset	1
26.	Kasubbid Pengendalian dan Penghapusan Aset	1
27.	Staf Kasubbid Pengendalian dan Penghapusan Aset	1
28.	Staf Kasubbid Pengendalian dan Penghapusan Aset	1
29.	Kasubbid Pendataan dan Perawatan Aset	1
30.	Staf Kasubbid Pendataan dan Perawatan Aset	2
Total		52

*Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kab. Deli Serdang*

## 1. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang diteliti. Arikunto<sup>36</sup> menyatakan “apabila subjek penelitian kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Dan jika jumlahnya lebih dari 100 maka diambil sekitar 10-15% atau 20-20% atau lebih.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, dengan jumlah sampel dipenelitian ini berjumlah 52 orang, maka penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh atau sensus. Menurut Sugiyono<sup>37</sup> sampling jenuh adalah teknik pengumpulan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

## E. Definisi Operasional

Definisi operasional variable penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Definisi operasional penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

### 1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel independen disebut juga dengan variabel bebas merupakan jenis variabel yang dipandang sebagai penyebab munculnya variabel dependen yang diduga sebagai akibatnya. Variabel ini secara sistematis disimbolkan dengan huruf  $x$ . Variabel bebas dalam penelitian

---

<sup>36</sup> Arikunto, Suharsimi., “*Prosedur Penelitian*”, Jakarta: Rhineka Cipta (2013)

<sup>37</sup> Sugiyono. ” *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”. Bandung : Alfabeta, CV. (2017)

ini adalah Aksesibilitas laporan Keuangan (X1) dan Sistem Pengendalian Intern (X2).

**Tabel 3.3. Defenisi Operasional Variabel Bebas (X1)**

Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
Aksesibilitas laporan Keuangan (X1)	Aksesibilitas Laporan Keuangan yang dikemukakan oleh Henley,D.A,Likierman. J. Perrin, M. Svans, I. Lapsley, & J. Whiteoak (1992) merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan	a. Laporan keuangan dapat diakses b. Laporan keuangan dipublikasikan melalui media umum	likert

**Tabel 3.4. Defenisi Operasional Variabel Bebas (X2)**

Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
Sistem Pengendalian Intern (X2)	Pengendalian intern yang dikemukakan oleh Purnomo, D. A. B. dan B. S. (2014) merupakan salah satu fondasi terkuat <i>good governance</i> . Sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin	a. Integritas data b. Ketepatan input dan posting data c. Prosedur otorisasi dokumen transaksi d. Tersimpannya dokumen sumber data e. Pembagian tanggungjawab	Likert
	kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi	f. Penentuan kebijakan dan standar akuntansi g. Implementasi kebijakan dan standar	Likert



	pemerintah, dan menjamin pengamanan aset Negara		
--	-------------------------------------------------	--	--

## 2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel Dependen disebut juga dengan variabel terikat merupakan jenis variabel yang dipengaruhi oleh variabel dependen. Variabel ini secara sistematis disimbolkan dengan huruf *y*. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

**Tabel 3.5**  
**Defenisi Operasional Variabel Terikat (Y)**

Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan menurut Halim, Abdul (2000) merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan	<p>a. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku bagi stakeholders.</p> <p>b. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang</p>	Likert

		<p>berlaku.</p> <p>c. Adanya mekanisme yang menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi.</p> <p>d. Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang</p>	
	<p>kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut</p>	<p>telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.</p> <p>e. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal.</p> <p>f. Terdapat akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.</p> <p>g. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil</p>	Likert

		<p>yang telah dicapai pemerintah.</p> <p>h. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.</p>	
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## F. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sebenarnya mengenai topik yang akan diteliti, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data.

### 1. Kuisisioner

Kuisisioner adalah sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Pengumpulan data yang diadakan dengan cara menyebarkan kuisisioner berisi pertanyaan kepada objek penelitian. Kuisisioner yang diberikan kepada pegawai Badan Pengelola dan Aset Kab. Deli Serdang adalah Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Aksesibilitas laporan keuangan, dan Sistem pengendalian intern menggunakan tertutup dalam bentuk skala *likert*.

Skala *likert* merupakan skala pengukuran yang sudah menyatakan peringkat antar tingkatan yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap objek atau kejadian tertentu. Variabel ini, menggunakan kuisisioner yang terdiri dari 10 item pernyataan dan

menggunakan skala *likert* dan memberikan skor dari jawaban responden yakni : (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral atau kurang setuju, (4) setuju, dan (5) sangat setuju (Sugiyono).

## G. Teknik Analisis Data

Seluruh penyajian dan analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS (Statistical Product and Service Solution) 20.0 for windows. Penelitian diuji dengan beberapa uji statistik yang terdiri dari uji kualitas data, uji asumsi klasik, statistik deskriptif dan pengujian hipotesis. Berikut penjelasannya:

### 1. Uji Instrumen Penelitian

#### a. Uji Validitas Kuisisioner

Menurut Arikunto<sup>38</sup> menyatakan bahwa “Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Untuk mengetahui validitas kuisisioner maka dilakukan uji coba instrumen sbelum pengambilan data. Pengujian validitas kuisisioner digunakan analisis item, yaitu dengan mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Untuk mencari validitas kuisisioner digunakan rumus korelasi product moment:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

$r_{xy}$  : Koefisien korelasi antara skor butir dengan skor total

$\sum X$  : Jumlah masing-masing skor butir

$\sum Y$  : Jumlah keseluruhan total butir

---

<sup>38</sup> Arikunto, Suharsimi, “*Prosedur Penelitian*”, Jakarta: Rhineka Cipta, 2013.

$\Sigma XY$  : Nilai hasil kali jumlah skor butir dengan jumlah skor total

$\Sigma X^2$  : Jumlah kuadrat skor distribusi skor butir

$\Sigma Y^2$  : Jumlah kuadrat skor distribusi skor total

N : Jumlah responden dan banyaknya sampel

Hasil dari validitas selanjutnya dikonsultasikan dengan tabel koefisien korelasi ( $r_{tabel}$ ) dengan kriteria, jika ( $r_{hitung} > r_{tabel}$ ) pada taraf signifikan 95% atau  $\alpha = 5\%$ , maka instrument dianggap valid. Sebaliknya jika ( $r_{hitung} < r_{tabel}$ ) maka instrument dianggap tidak valid.

### b. Uji Reliabilitas Kuisisioner

Menurut Arikunto: “Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah bagus. Untuk memperoleh jumlah varians butir kuisisioner, terlebih dahulu dicari varians setiap butir, kemudian dijumlahkan. Varians setiap butir dihitung dengan rumus:

$$\sigma_b^2 = \frac{\Sigma X^2 - \left(\frac{\Sigma X}{N}\right)^2}{N}$$

Keterangan:

$\sigma_b^2$  = varians butir kuisisioner

N = Banyaknya sampel

X = skor yang diperoleh dari butir pertanyaan

Untuk menghitung varians total dihitung dengan rumus:

$$\sigma_t^2 = \frac{\Sigma X^2 t - \left\{\frac{\Sigma X t}{N}\right\}^2}{N}$$

Keterangan:

$\sigma_t^2$  = varians total

N = Banyaknya sampel

X = Skor yang diperoleh dari butir pertanyaan

t = total soal

Untuk menguji reliabilitas instrument digunakan rumus alpha (Arikunto), yaitu sebagai berikut:

$$r_{11} = \left( \frac{k}{k-1} \right) \left( 1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right)$$

Keterangan:

$r_{11}$  = reliabilitas instrumen

$\sum \sigma_b^2$  = jumlah varians butir

K = banyaknya butir pertanyaan atau soal

Dengan kriteria jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  pada taraf signifikan 95% ( $\sigma = 5\%$ ) maka kuisisioner tersebut dianggap reliabel dan jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$ , maka instrument dianggap tidak reliabel.

## 2. Uji Asumsi Klasik

Regresi linier dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi kriteria BLUE (*best linear unbiased estimator*). BLUE dapat dicapai bila memenuhi uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model estimasi telah memenuhi kriteria ekonometrika, dalam arti tidak terjadi penyimpangan yang cukup serius dari asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Sedikitnya terdapat empat uji asumsi yang harus dilakukan terhadap suatu model regresi linier sederhana, yaitu :

### a. Uji Normalitas

Uji normalitas data untuk mengetahui apakah variabel dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Model yang paling baik hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal. Sudjana

dalam Pasaribu<sup>39</sup> menyatakan bahwa “Uji yang digunakan adalah uji normalitas Liliefors dengan mendistribusikan data ke dalam program SPSS versi 20.0. Dari proses input ini akan menghasilkan *output test of normality*. Untuk mengetahui data normal atau tidak dilakukan dengan membandingkan nilai sig. Uji Kolmogorov-smirnov atau Uji Liliefors (lihat tanda “a”) dan juga pada uji Shapiro-Wilk. Kedua nilai sig. dari kedua kelompok tersebut dibandingkan dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika sig. atau probabilitas  $> 0,05$  maka sampel berdistribusi normal
- Jika sig. atau probabilitas  $< 0,05$  maka sampel tidak berdistribusi normal

#### **b. Uji Multikolinearitas**

Menurut Ghazali<sup>40</sup>, Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel- variabel ini tidak orthogonal.

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas, yaitu dengan menganalisis matriks korelasi variabel-variabel independen yang dapat dilihat melalui Variance Inflation Factor (VIF). Nilai VIF yang bias ditoleransi adalah 10. Apabila VIF variabel-variabel independen  $< 10$ , berarti tidak ada Multikolinearitas.

---

<sup>39</sup> Sudjana, “*Metoda Statistika*”, Bandung: PT. Tarsito Bandung, 2008, hlmn 44.

<sup>40</sup> Ghazali, I, “*Statistik non-parametrik, teori dan aplikasi dengan program*” SPSS. Semarang: Universitas Diponegoro, 2006.

### c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas<sup>41</sup>.

Metode pengujian yang digunakan untuk melihat adanya heterokedastisitas dalam penelitian adalah metode scatter-plot dan glejser. Uji Scatter-plot bias dilakukan dengan melihat pola. Jika tidak ada pola jelas (titik-titik menyebar) maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan glejser dapat dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel *independent* dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel *independent* dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

### 3. Analisis Regresi Linear Berganda

Teknik analisis data dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas ( $X_1$ ,  $X_2$ ) terhadap variabel terikat ( $Y$ ). Analisis regresi linear ganda digunakan untuk mengetahui pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan ( $X_1$ ) dan Sistem Pengendalian Intern ( $X_2$ ) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah ( $Y$ ). Sugiono menyatakan bahwa persamaan regresi linear ganda dapat dicari dengan menggunakan

---

<sup>41</sup> Ghozali, I, "Statistik non-parametrik, teori dan aplikasi dengan program" SPSS. Semarang: Universitas Diponegoro, 2006.



persamaan dari, yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana:

Y = Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

$X_1$  = Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan

$X_2$  = Variabel Sistem Pengendalian Intern

$b_1$  = koefisien regresi  $X_1$

$b_2$  = koefisien regresi  $X_2$

a = konstanta

#### 4. Uji Hipotesis

##### a. Uji t (Pengujian Hipotesis Secara Parsial)

Untuk menguji setiap variabel independen apakah berpengaruh terhadap variabel dependen dilakukan uji “t”. Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk menguji apakah ada pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di BPKA Kab. Deli Serdang dan apakah ada pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di BPKA Kab. Deli Serdang.

Menurut Sugiyono<sup>42</sup> rumus yang digunakan adalah :

$$t_{regresi} = \frac{b_i - \beta_i}{S_{b_i}}$$

Keterangan:

$b_i$  = koefisien regresi variabel

$S_{b_i}$  = standar error/kesalahan standar koefisien regresi variabel ( $b_i$ )

$\beta_i$  = koefisien beta/parameter ke-1 dihipotesiskan

Harga ini kemudian dikonsultasikan dengan  $t_{tabel}$ . Jika  $t_{hitung} \geq$

$t_{tabel}$  pada taraf signifikan 95% berarti terdapat pengaruh yang positif

<sup>42</sup> Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan”, Bandung: Alfabeta, 2013, hlmn 175.

antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sebaliknya jika  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$  dengan taraf signifikan 95% maka tidak ada pengaruh yang positif antara variabel bebas dengan variabel terikat.

### b. Uji F (Pengujian Hipotesis Secara Simultan)

Sugiyono<sup>43</sup> menyatakan “Untuk menguji pengaruh antara kedua variabel ( $X_1, X_2$ ) terhadap Y, dilakukan uji F”, dengan rumus yaitu:

$$F_{reg} = \frac{\frac{R^2}{k}}{\frac{1-R^2}{n-k-1}}$$

Keterangan:

$F_{reg}$  = harga F garis regresi

K = Jumlah variabel independen

N = Jumlah anggota sampel

$R^2$  = koefisien korelasi ganda

Apabila  $F_{hitung} \geq F_{tabel}$  pada taraf signifikan 95% maka terdapat pengaruh positif status Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di BPKA Kab. Deli Serdang. Sebaliknya jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka variabel bebas tidak berpengaruh positif terhadap variabel terikat.

### c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa jauh sumbangan variabel bebas ( $X_1, X_2$ ) terhadap variabel terikat (Y) dengan adanya regresi linear berganda. Dalam penelitian ini koefisien determinasi dilakukan untuk melihat hubungan yang sempurna atau tidak, yang

---

<sup>43</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan*”, Bandung: Alfabeta, 2013, hlmn 266.

ditunjukkan pada apakah perubahan variabel bebas (Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern) akan diikuti oleh variabel terikat (Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di BPKA Kab. Deli Serdang.) pada proporsi yang sama. *Range* nilai dari  $R^2$  adalah 0-1 ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Semakin mendekati nol berarti model tidak baik, sebaliknya semakin mendekati 1 maka semakin baik. Besarnya koefisien determinasi ( $R^2$ ) dapat dicari dengan rumus:

$$1 = R^2 \times 100\%, \text{ dimana } R^2 = \frac{jk \text{ reg}}{jk T}$$

$$jk \text{ reg} = b_1 \Sigma X_1 + b_2 \Sigma X_2 Y + \dots + b_1 \Sigma X_1 Y, \text{ maka } Jk = \Sigma Y^2$$

Dari koefisien determinasi dapat diketahui berapa besar kontribusi variabel bebas ( $X_1, X_2$ ) terhadap variabel terikat (Y).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang**

Lokasi kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang berada di jalan Mawar No.8 Lubuk Pakam yang berada di kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang merupakan lembaga teknis daerah dan bagian dari perangkat daerah kabupaten yang mempunyai tugas-tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam melaksanakan tugas yang demikian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

## **Visi, Misi dan Motto serta Program BPKA Kab. Deli Serdang**

### **1) Visi**

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Akuntabel

### **2) Misi**

- a. Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- b. Meningkatkan Perencanaan dan Pengendalian Anggaran yang Efektif dan Efisien.
- c. Pelaksanaan Anggaran yang Tepat Waktu Serta Pengendalian Belanja Daerah.
- d. Peningkatan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten.
- e. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel

### **3) Motto**

Untuk Mewujudkan Pengelola Keuangan Yang Transparan dan Akuntabel.

## **B. Hasil Uji Instrumen Penelitian**

### **1. Uji Validitas dan Reliabilitas Kuisisioner**

Sebelum melakukan penelitian yang sesungguhnya, kuisisioner sebagai instrumen penelitian diuji coba pada 52 pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Deli Serdang. Pengujian validitas dan reliabilitas kuisisioner penelitian ini menggunakan *Product Moment* dan

*Cronbach Alpha* dengan ketentuan jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka butir soal dianggap valid dengan taraf signifikansi 95% atau  $\alpha = 0,05$ .

## 2. Aksesibilitas Laporan Keuangan ( $X_1$ )

Dengan menggunakan *Product Moment* pada program SPSS 20.00 *for windows* dari hasil uji validitas pada kuisisioner ekstrakurikuler pramuka ( $X_1$ ) sebanyak 10 butir soal kuisisioner kepada 52 responden, diperoleh 10 butir soal kuisisioner tersebut dinyatakan valid, karena  $r_{hitung} > r_{tabel}$  pada taraf signifikansi 95% atau  $\alpha = 0,05$ . Berikut ini disajikan tabel hasil pengujian validitas kuisisioner variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan ( $X_1$ ).

**Tabel 4.1**  
**Hasil Perhitungan Uji Validitas Kuisisioner Aksesibilitas Laporan Keuangan**  
**( $X_1$ )**

No. Item	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
1	0,679	0,2262	Valid
2	0,496	0,2262	Valid
3	0,504	0,2262	Valid
4	0,324	0,2262	Valid
5	0,701	0,2262	Valid
6	0,512	0,2262	Valid
7	0,448	0,2262	Valid
8	0,701	0,2262	Valid
9	0,405	0,2262	Valid
10	0,531	0,2262	valid

(Sumber: pengolahan data dengan program SPSS 20)

Sedangkan untuk menghitung reliabilitas kuisisioner digunakan rumus *Cronbach Alpha* dari 10 kuesioner yang valid. Hasil perhitungan reliabilitas adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Reliabilitas Kuisisioner Aksesibilitas Laporan Keuangan (X<sub>1</sub>)**

<b>Reliability Statistics</b>	
<b>Cronbach's Alpha</b>	<b>N of Items</b>
,717	10

(Sumber: pengolahan data dengan program SPSS 20)

Dari hasil perhitungan uji reliabilitas pada tabel 4.2 di atas diperoleh nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,725. Nilai tersebut lebih besar dari  $r_{tabel}$  pada taraf signifikan 95% dengan  $\alpha = 5\%$  dan  $df - 2 = 52 - 3 = 49$ , yaitu 0.2759. Angka ini menunjukkan bahwa kuisisioner ini terbukti reliabel untuk digunakan karena  $r_{hitung} > r_{tabel}$  ( $0,717 > 0.276$ ).

### 3. Sistem Pengendalian Intern (X<sub>2</sub>)

Dengan menggunakan *Product Moment* pada program SPSS 20.00 *for windows* dari hasil uji validitas pada kuisisioner Sistem Pengendalian Intern (X<sub>2</sub>) sebanyak 10 butir soal kuisisioner kepada 52 responden, diperoleh 10 butir soal kuisisioner tersebut dinyatakan valid, karena  $r_{hitung} > r_{tabel}$  pada taraf signifikansi 95% atau  $\alpha = 0,05$ . Berikut ini disajikan tabel hasil pengujian validitas kuisisioner variabel Sistem Pengendalian Intern (X<sub>2</sub>).

**Tabel 4.3**  
**Hasil Perhitungan Uji Validitas Kuisisioner Sistem Pengendalian Intern (X<sub>2</sub>)**

<b>No. Item</b>	<b><math>r_{hitung}</math></b>	<b><math>r_{tabel}</math></b>	<b>Keterangan</b>
1	0,658	0,2262	Valid
2	0,531	0,2262	Valid
3	0,637	0,2262	Valid
4	0,346	0,2262	Valid

5	0,681	0,2262	Valid
6	0,374	0,2262	Valid
7	0,667	0,2262	Valid
8	0,607	0,2262	Valid
9	0,549	0,2262	Valid
10	0,643	0,2262	valid

(Sumber: pengolahan data dengan program SPSS 20)\

Sedangkan untuk menghitung reliabilitas kuisiener digunakan rumus *Cronbach Alpha* dari 10 kuisiener yang valid. Hasil perhitungan reliabilitas adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4**

**Hasil Uji Reliabilitas Kuisiener Sistem Pengendalian Intern (X<sub>2</sub>)**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,761	10

(Sumber: pengolahan data dengan program SPSS 20)

Dari hasil perhitungan uji reliabilitas pada tabel 4.4 di atas diperoleh nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,767. Nilai tersebut lebih besar dari  $r_{tabel}$  pada taraf signifikan 95% dengan  $\alpha$  5% dan  $df - 2 = 52 - 3 = 49$ , yaitu 0.276. Angka ini menunjukkan bahwa kuisiener ini terbukti reliabel untuk digunakan karena  $r_{hitung} > r_{tabel}$  ( $0,761 > 0.276$ ).

#### **4. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)**

Dengan menggunakan *Product Moment* pada program SPSS 20.00 *for windows* dari hasil uji validitas pada kuisiener Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) sebanyak 10 butir soal kuisiener kepada 52 responden, diperoleh 10 butir soal kuisiener tersebut dinyatakan valid, karena  $r_{hitung} > r_{tabel}$



pada taraf signifikansi 95% atau  $\alpha = 0,05$ . Berikut ini disajikan tabel hasil pengujian validitas kuisisioner variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).

**Tabel 4.5**  
**Hasil Perhitungan Uji Validitas Kuisisioner Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)**

No. Item	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
1	0,509	0,2262	Valid
2	0,675	0,2262	Valid
3	0,675	0,2262	Valid
4	0,591	0,2262	Valid
5	0,656	0,2262	Valid
6	0,578	0,2262	Valid
7	0,542	0,2262	Valid
8	0,509	0,2262	Valid
9	0,435	0,2262	Valid
10	0,519	0,2262	valid

(Sumber: pengolahan data dengan program SPSS 20)

Sedangkan untuk menghitung reliabilitas kuisisioner digunakan rumus *Cronbach Alpha* dari 10 kuesioner yang valid. Hasil perhitungan reliabilitas adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Reliabilitas Kuisisioner Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,767	10

(Sumber: pengolahan data dengan program SPSS 20)

Dari hasil perhitungan uji reliabilitas pada tabel 4.4 di atas diperoleh nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,767. Nilai tersebut lebih besar dari  $r_{tabel}$  pada taraf

signifikan 95% dengan Alpha 5% dan  $df - 2 = 52 - 2 = 49$ , yaitu 0.276. Angka ini menunjukkan bahwa kuisisioner ini terbukti reliabel untuk digunakan karena  $r_{hitung} > r_{tabel}$  ( $0,767 > 0.276$ ).

### C. Analisis Deskriptif

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Deli Serdang, pada bulan September 2020 dengan populasi sebanyak 52 orang, dalam pengambilan sampel September. penelitian ini menggunakan teknik *total sampling*. Oleh karena itu jumlah sampel peneliti adalah 52 orang. Dalam penelitian ini sistem pengujian validitas dan reliabilitas instrument dilakukan dengan cara sampel terpakai, yang artinya jika sampel terbukti valid maka sampel dan hasil datanya dapat digunakan untuk diteliti dan jika tidak valid secara otomatis sampel dan hasil datanya tidak digunakan untuk diteliti.

Berdasarkan jawaban atas kuisisioner yang telah disebar, peneliti membuat daftar distribusi frekuensi atas jawaban variabel  $X_1$ ,  $X_2$ , dan  $Y$  merupakan daftar yang diperoleh dari hasil jawaban atas kuisisioner pada skala nilai berikut :

$$Interval = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jarak Interval}} \quad (\text{Sudjana})$$

Berdasarkan rumus, maka diperoleh :

$$Interval = \frac{5 - 1}{5} = 0,8$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, diperoleh panjang interval yaitu sebesar 0,8 dengan kategori :

**Tabel 4.7**  
**Kategori Penilaian**

Interval	Kategori
1,00 – 1,80	Tidak Baik
1,81 – 2,60	Kurang Baik
2,61 – 3,40	Netral
3,41 – 4,21	Baik
4,22 – 5,00	Sangat Baik

*Sumber : Sudjana ( 2008 : 150)*

### 1. Deskripsi Variabel Akuntabilitas Laporan Keuangan (Y)

Pada penelitian ini, variabel Akuntabilitas Laporan Keuangan (Y) dapat diukur dengan 8 indikator yaitu:

1. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku bagi stakeholders.
2. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku.
3. Adanya mekanisme yang menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi.
4. Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.
5. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media massa, maupun media komunikasi personal.
6. Terdapat akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.

7. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai pemerintah.
8. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

Pada tabel 4.8 dapat dilihat deskripsi data variabel minat belajar ( $X_2$ ).

Setelah penelitian dilakukan , maka diperoleh data primer hasil penelitian dengan jumlah responden sebanyak 52 pegawai, 10 pertanyaan dengan 5 item jawaban yang dapat dilihat pada tabulasi distribusi frekuensi jawaban responden berikut :

**Tabel 4.8**  
**Distribusi Frekuensi Akuntabilitas Laporan keuangan ( Y )**

NO	Alternatif Jawaban										Jumlah		Rata-rata	Kategori
	A = 5		B = 4		C = 3		D = 2		E = 1					
	F	SC	F	SC	F	SC	F	SC	F	SC	F	SC		
1	0	0	0	0	13	39	31	62	8	8	52	109	2,1	Kurang baik
2	20	100	26	104	6	18	0	0	0	0	52	222	4,27	Sangat Baik
3	20	100	26	104	6	18	0	0	0	0	52	222	4,27	Sangat Baik
4	16	80	30	120	6	18	0	0	0	0	52	218	4,20	baik
5	0	0	0	0	10	30	31	62	11	11	52	103	1,98	Kurang baik
6	25	125	100	2	6	18	0	0	0	0	52	231	4,44	Sangat Baik
7	22	110	24	96	2	6	0	0	0	0	52	212	4,08	baik
8	0	0	0	0	13	39	31	62	8	8	52	102	1,96	Kurang baik
9	0	0	0	0	6	18	26	52	20	20	52	90	1,73	Tidak baik
10	0	0	0	0	4	12	25	50	23	23	52	95	1,83	Kurang baik
<b>TOTAL</b>											52	1604	30,86	-

(Sumber: Data Kuisisioner Penelitian Akuntabilitas Laporan keuangan)

Keterangan :

F = Frekuensi jawaban

SC = Frekuensi x nilai jawaban

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi jawaban kuisisioner Akuntabilitas Laporan keuangan (Y) diperoleh interpretasi data masing-masing pernyataan kuisisioner tentang kegiatan Akuntabilitas Laporan keuangan terlihat adalah sebagai berikut:

1. Proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan sudah dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan Masyarakat memperoleh nilai rata-rata sebesar 2,1 sehingga dikategorikan kurang baik.
2. Saya bekerja berdasarkan pedoman mengenai proses akuntansi yang telah ada memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,27 sehingga dikategorikan sangat baik.
3. Pengelolaan keuangan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,27 sehingga dikategorikan sangat baik.
4. Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan telah menggambarkan dengan jujur transaksi yang seharusnya terjadi memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,20 sehingga dikategorikan baik.
5. Proses pertanggungjawaban dilakukan secara terbuka, cepat dan tepat memperoleh nilai rata-rata sebesar 1,98 sehingga dikategorikan kurang baik.
6. Ketersediaan/keterbukaan ruang akses yang memadai dapat membantu dalam pengambilan keputusan secara cepat, tepat dan akurat memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,44 sehingga dikategorikan sangat baik.
7. Laporan keuangan yang disusun dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,08 sehingga dikategorikan baik.

8. Adanya proses monitoring kinerja dan evaluasi manajemen dalam organisasi memperoleh nilai rata-rata sebesar 1,96 sehingga dikategorikan kurang baik.
9. Laporan Penggunaan Anggaran disajikan secara terbuka, cepat dan tepat kepada seluruh masyarakat memperoleh nilai rata-rata sebesar 1,73 sehingga dikategorikan tidak baik.
10. Penyajian laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi kinerja sekaligus menjadi bukti pertanggungjawaban memperoleh nilai rata-rata sebesar 1,83 sehingga dikategorikan kurang baik.

Berdasarkan hasil analisis data penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Aksesibilitas laporan keuangan tergolong kategori Netral dengan nilai rata-rata 3,086.

Hasil analisis distribusi frekuensi kuisioner Akuntabilitas Laporan keuangan (Y), kemudian dituangkan ke dalam interval presentasi skor. Dengan skor – skor yang dihasilkan dari kuisioner yang telah diberikan kepada 52 pegawai BPKA Kab. Deli Serdang sebagai responden penelitian sehingga diperoleh skor tentang variabel Sistem Pengendalian Intern yaitu skor tertinggi = 236 dan skor terendah 83.

## **2. Deskripsi Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan ( $X_1$ )**

Pada penelitian ini, variabel Aksesibilitas laporan keuangan ( $X_1$ ) dapat diukur dengan 2 indikator yaitu: Laporan keuangan dapat diakses, dan Laporan keuangan dipublikasikan melalui media umum. Pada tabel 4.8 dapat dilihat deskripsi data variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan ( $X_1$ ).

Setelah penelitian dilakukan, maka diperoleh data primer hasil penelitian dengan jumlah responden sebanyak 52 pegawai, 10 pertanyaan dengan 5 item jawaban yang dapat dilihat pada tabulasi distribusi frekuensi jawaban responden berikut :

**Tabel 4.9**  
**Distribusi Frekuensi Aksesibilitas Laporan Keuangan (  $X_1$  )**

NO	Alternatif Jawaban										Jumlah		Rata-rata	Kategori
	A = 5		B = 4		C = 3		D = 2		E = 1					
	F	SC	F	SC	F	SC	F	SC	F	SC	F	SC		
1	0	0	0	0	13	39	31	62	8	8	52	109	2,1	Kurang baik
2	25	125	23	92	4	12	0	0	0	0	52	229	4,4	Sangat Baik
3	34	170	16	64	2	6	0	0	0	0	52	240	4,62	Sangat Baik
4	16	80	30	120	6	18	0	0	0	0	52	218	4,2	Baik
5	0	0	0	0	13	39	31	62	8	8	52	109	2,1	Kurang baik
6	25	125	25	100	2	6	0	0	0	0	52	231	4,44	Sangat Baik
7	22	110	24	96	6	18	0	0	0	0	52	224	4,31	Sangat Baik
8	13	65	31	124	8	16	0	0	0	0	52	205	3,94	Baik
9	0	0	0	0	6	18	27	54	19	19	52	91	1,75	Tidak Baik
10	0	0	0	0	4	12	34	68	14	14	52	94	1,81	Netral
TOTAL											52	1750	33,65	-
RATA RATA													3,365	Netral

(Sumber: Data Kuisisioner Aksesibilitas Laporan Keuangan)

Keterangan :

F = Frekuensi jawaban

SC = Frekuensi x nilai jawaban

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi jawaban kuisisioner Aksesibilitas Laporan Keuangan dari 52 responden yang diteliti, diperoleh interpretasi data masing-masing pernyataan kuisisioner tentang kegiatan Aksesibilitas Laporan Keuangan terlihat adalah sebagai berikut:

1. Keterbukaan laporan keuangan, memperoleh nilai rata-rata sebesar 2,1 sehingga dikategorikan kurang baik.
2. Tidak menyajikan laporan keuangan secara lengkap memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,4 sehingga dikategorikan sangat baik.
3. Memberikan kemudahan akses laporan keuangan melalui media, surat kabar, radio, televisi, dan website (internet) memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,62 sehingga dikategorikan sangat baik.
4. Tidak semua stakeholder (Masyarakat, pemerintah pusat, dan pihak yang berkepentingan) dapat mengakses laporan keuangan memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,2 sehingga dikategorikan sangat baik.
5. Laporan keuangan menghasilkan informasi yang lengkap mencakup semua informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan memperoleh nilai rata-rata sebesar 2,1 sehingga dikategorikan kurang baik.
6. Informasi keuangan yang disajikan dapat dipahami oleh pengguna memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,44 sehingga dikategorikan sangat baik.
7. Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (website) memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,31 sehingga dikategorikan sangat baik.
8. Penyajian laporan keuangan yang diberikan sesuai peraturan yang berlaku memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,94 sehingga dikategorikan baik.



9. Adanya ruang akses masyarakat untuk memberikan saran, dan kritik atas hasil laporan keuangan memperoleh nilai rata-rata sebesar 1,75 sehingga dikategorikan tidak baik.
10. Adanya sosialisasi instansi yang terkait secara langsung kepada masyarakat yang terkait mengenai penjelasan laporan keuangan yang dihasilkan memperoleh nilai rata-rata sebesar 1,81 sehingga dikategorikan Netral.

Berdasarkan hasil analisis data penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Aksesibilitas laporan keuangan tergolong kategori Netral dengan nilai rata-rata 3,365.

Hasil analisis distribusi frekuensi kuisioner Aksesibilitas laporan keuangan ( $X_1$ ), kemudian dituangkan ke dalam interval presentasi skor. Dengan skor – skor yang dihasilkan dari kuisioner yang telah diberikan kepada 52 pegawai BPKA Kab. Deli Serdang sebagai responden penelitian sehingga diperoleh skor tentang variabel Aksesibilitas laporan keuangan yaitu skor tertinggi = 240 dan skor terendah 91.

### **3. Deskripsi Variabel Sistem Pengendalian Intern ( $X_2$ )**

Pada penelitian ini, variabel Sistem Pengendalian Intern ( $X_2$ ) dapat diukur dengan 7 indikator yaitu: Integritas data, Ketepatan input dan posting data, Prosedur otorisasi dokumen transaksi, Tersimpannya dokumen sumber data, Pembagian tanggungjawab, Penentuan kebijakan dan standar akuntansi, Implementasi kebijakan dan standar. Pada tabel 4.10 dapat dilihat deskripsi data variabel Sistem Pengendalian Intern ( $X_2$ ).

Setelah penelitian dilakukan , maka diperoleh data primer hasil penelitian dengan jumlah responden sebanyak 52 pegawai, 10 pertanyaan dengan 5 item jawaban yang dapat dilihat pada tabulasi distribusi frekuensi jawaban responden berikut:

**Tabel 4.10**  
**Distribusi Frekuensi Sistem Pengendalian Intern (  $X_2$  )**

NO	Alternatif Jawaban										Jumlah		Rata-rata	Kategori
	A = 5		B = 4		C = 3		D = 2		E = 1					
	F	SC	F	SC	F	SC	F	SC	F	SC	F	SC		
1	20	100	26	104	6	18	0	0	0	0	52	222	4,27	Sangat Baik
2	0	0	0	0	15	75	32	64	5	5	52	144	2,77	Netral
3	0	0	0	0	12	36	29	58	11	11	52	105	2,02	Kurang baik
4	0	0	0	0	7	21	17	34	28	28	52	83	1,6	Tidak Baik
5	0	0	0	0	19	57	28	56	5	5	52	118	2,27	Kurang baik
6	34	170	12	48	6	18	0	0	0	0	52	236	4,54	Sangat Baik
7	0	0	0	0	9	27	21	42	22	22	52	91	1,75	Tidak Baik
8	25	125	23	92	4	12	0	0	0	0	52	229	4,4	Sangat Baik
9	30	150	14	56	8	24	0	0	0	0	52	230	4,4	Sangat Baik
10	22	110	24	96	6	18	0	0	0	0	52	224	4,31	Sangat Baik
<b>TOTAL</b>											52	1682	32,33	-
<b>RATA RATA</b>													3,23	Netral

(Sumber: Data Kuisisioner Aksesibilitas Laporan Keuangan)

Keterangan :

F = Frekuensi jawaban

SC = Frekuensi x nilai jawaban

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi jawaban kuisisioner Sistem Pengendalian Intern dari 52 responden yang diteliti, diperoleh interpretasi data masing-masing pernyataan kuisisioner tentang kegiatan Aksesibilitas Laporan Keuangan terlihat adalah sebagai berikut:

1. Instansi/Lembaga tempat saya bekerja telah menerapkan kode etik secara tertulis. memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,27 sehingga dikategorikan sangat baik.
2. Pimpinan Instansi/Lembaga ditempat saya bekerja telah memberikan contoh dalam berperilaku mengikuti kode etik memperoleh nilai rata-rata sebesar 2,77 sehingga dikategorikan netral.
3. Ditempat saya bekerja telah menerapkan pengendalian intern dan manajemen terhadap resiko memperoleh nilai rata-rata sebesar 2,02 sehingga dikategorikan Kurang baik.
4. Ditempat saya bekerja telah menerapkan penentuan batas dan penentuan Toleransi memperoleh nilai rata-rata sebesar 1,6 sehingga dikategorikan Tidak Baik.
5. Ditempat saya bekerja telah menerapkan pemisahan tugas yang memadai memperoleh nilai rata-rata sebesar 2,27 sehingga dikategorikan kurang baik.
6. Setiap transaksi dan aktivitas ditempat saya bekerja telah didukung dengan otorisasi dari pihak yang berwenang memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,54 sehingga dikategorikan sangat baik.
7. Dalam waktu yang tidak ditentukan pimpinan melakukan pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi memperoleh nilai rata-rata sebesar 1,75 sehingga dikategorikan tidak baik.
8. Ditempat saya bekerja telah menerapkan sistem informasi untuk melaksanakan tanggungjawab memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,4 sehingga dikategorikan sangat baik.

9. Ditempat saya bekerja telah melaksanakan sistem akuntansi yang memungkinkan audit memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,4 sehingga dikategorikan sangat baik.
10. Adanya pengawasan secara rutin di tempat saya bekerja mengenai kinerja yang dikerjakan memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,31 sehingga dikategorikan sangat baik.

Berdasarkan hasil analisis data penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Aksebilitas laporan keuangan tergolong kategori Netral dengan nilai rata-rata 3,23.

Hasil analisis distribusi frekuensi angket Sistem Pengendalian Intern ( $X_2$ ), kemudian dituangkan ke dalam interval presentasi skor. Dengan skor – skor yang dihasilkan dari angket yang telah diberikan kepada 52 pegawai BPKA Kab. Deli Serdang sebagai responden penelitian sehingga diperoleh skor tentang variabel Sistem Pengendalian Intern yaitu skor tertinggi = 236 dan skor terendah 83.

#### **D. Hasil Uji Asumsi Klasik**

##### **1. Uji Normalitas**

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam model regresi telah terdistribusi normal atau tidak. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *kolmogorov-smirnov* dan *normal probability plots*. Data dianalisis dengan bantuan program *SPSS versi 20 Windows 2010*. Data dikatakan memenuhi syarat jika signifikan dari uji *kolmogorov-smirnov*

$> 0,05$  dan jika garis data rill mengikuti garis diagonal pada *normal probability plots*.

Hasil uji normalitas seperti pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.11.**  
**Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

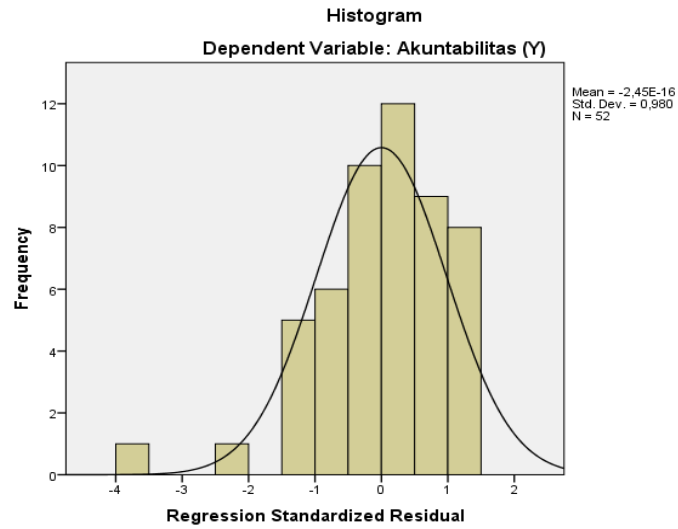
		Unstandardized Residual
N		52
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1,27070120
Most Extreme Differences	Absolute	,101
	Positive	,063
	Negative	-,101
Kolmogorov-Smirnov Z		,730
Asymp. Sig. (2-tailed)		,660

a. Test distribution is Normal.

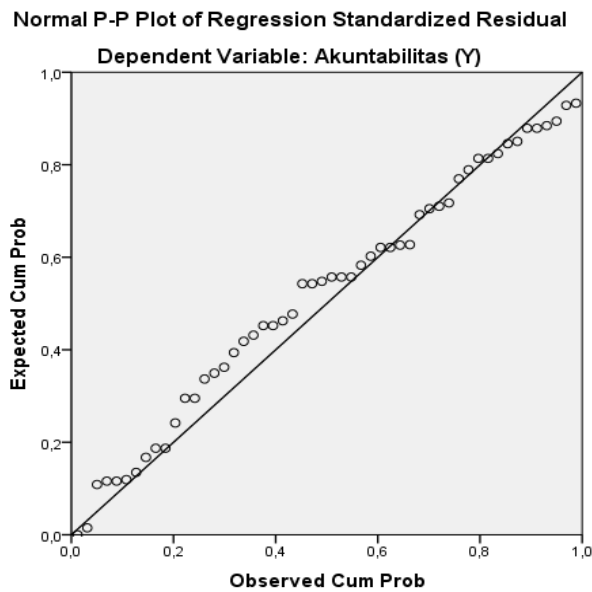
b. Calculated from data.

Tabel di atas menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan *kolmogorov-smirnov* yaitu:

1. Aksesibilitas Laporan Keuangan ( $X_1$ ) diperoleh nilai Asymp.Sig sebesar  $0,660 > 0,05$  berarti data Aksesibilitas Laporan Keuangan berdistribusi normal.
2. Sistem Pengendalian Intern ( $X_2$ ) diperoleh nilai Asymp.Sig sebesar  $0,660 > 0,05$  berarti data Sistem Pengendalian Intern berdistribusi normal.
3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) diperoleh nilai Asymp.Sig sebesar  $0,660 > 0,05$  berarti data Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah berdistribusi normal.



**Gambar 4.1**  
**Diagram Uji Normalitas (Histogram)**



**Gambar 4.2**  
**Diagram Uji Normalitas (Normal P-P Plot)**

*Histogram* dan *Normal Probability plots* di atas menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal karena garis titik mengikuti diagonal.

## 2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan nilai *Variance Inflating Factor* (VIF). Apabila nilai tolerance  $> 0,10$  atau VIF  $< 10$ .

**Tabel 4.12. Hasil Uji Multikolinieritas**

Coefficients <sup>a</sup>							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-6,414	2,069		-3,100	,003		
1 Aksesibilitas (X1)	,902	,056	,823	16,023	,000	,945	1,058
SPI (X2)	,278	,048	,295	5,752	,000	,945	1,058

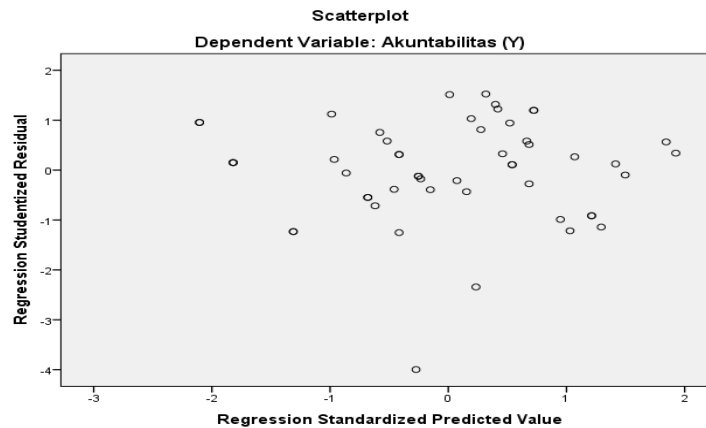
a. Dependent Variable: Akuntabilitas (Y)

*Sumber : Data diolah dengan SPSS 20.0*

Berdasarkan tabel 4.4 hasil uji multikolinearitas menunjukkan semua variabel independen memiliki nilai VIF dari kedua variabel  $< 10$  dan nilai tolerance  $> 0,1$  maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

## 3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali). dasar pengambilan keputusan untuk uji heteroskedastisitas adalah (Ghozali): a) Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu teratur (bergelombang, melebur kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



**Gambar 4.3. Posisi Scatterplot pada Uji Heterokedastisitas**

Dari gambar 4.3, pada *scatter plot* dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka pada model regresi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Deli Serdang tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

## **E. Analisis Data Hasil Penelitian**

### **1. Perhitungan Regresi Linear Berganda**

Setelah uji asumsi klasik dipenuhi, maka selanjutnya dilakukan perhitungan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara dua atau lebih variabel bebas (aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian intern) terhadap variabel terikat (Akuntabilitas Laporan Keuangan). Kemudian analisis ini digunakan untuk memprediksi nilai dari variabel bebas apabila nilai dari variabel terikat mengalami kenaikan atau penurunan serta untuk mengetahui arah hubungan antara variabel bebas berhubungan positif atau negatif. Berikut tabel hasil output regresi linear berganda dengan program *SPSS 20.00*



**Tabel 4.13**  
**Hasil Perhitungan Regresi Linear Berganda**

Model		Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6,414	2,069		-3,100	,003
	Aksesibilitas (X1)	,902	,056	,823	16,023	,000
	SPI (X2)	,278	,048	,295	5,752	,000

a. Dependent Variable: Y

Dari hasil pengolahan data yang ada pada tabel 4.15 maka dapat dibuat persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = - 6,414 + 0,902 X_1 + 0,278 X_2$$

Penjelasan persamaan regresi linear berganda tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta (a) sebesar - 6,414 artinya jika variabel *independent* yaitu Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern nilainya tetap, maka Akuntabilitas Laporan Keuangan berkurang sebesar -6,414.
- b. Nilai koefisien regresi variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan ( $b_1$ ) sebesar 0,902 artinya Apabila Aksesibilitas Laporan Keuangan ( $X_1$ ) naik sebesar 1% sedangkan variabel lain tetap, maka Akuntabilitas Laporan Keuangan akan meningkat sebesar 0,9%
- c. Nilai koefisien regresi variabel Sistem Pengendalian Intern ( $b_2$ ) sebesar 0,278 artinya Apabila Sistem Pengendalian Intern ( $X_2$ ) naik sebesar 1% sedangkan variabel lain tetap, maka Akuntabilitas Laporan Keuangan akan meningkat sebesar 0,28%

## F. Pengujian Hipotesis

### 1. Pengujian Hipotesis Parsial (Uji - t)

Pengujian hipotesis secara parsial ini dimaksudkan untuk menguji keberartian pengaruh dari masing-masing variabel bebas yaitu Aksesibilitas Laporan Keuangan ( $X_1$ ) dan Sistem Pengendalian Intern ( $X_2$ ), secara parsial mempengaruhi Akuntabilitas Laporan keuangan di BPKA Kab. Deli Serdang, maka digunakan uji t. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan besarnya angka sig dengan  $\alpha$ . Apabila hasil  $t_{hitung} > t_{tabel}$  pada taraf signifikan 95% atau  $\alpha = 5\%$  dengan dk (derajat kebebasan) =  $n - 2$ , maka hipotesis diterima dan jika  $sig. < 0,05$  berarti signifikan, namun sebaliknya bila hasil  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka hipotesis ditolak dan jika  $sig. > 0,05$  berarti tidak signifikan. Berikut tabel hasil perhitungan uji t dengan program *SPSS 20.00*.

**Tabel 4.14**  
**Hasil Perhitungan Uji t**

Model		Coefficients			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6,414	2,069		-3,100	,003
	Aksesibilitas (X1)	,902	,056	,823	16,023	,000
	SPI (X2)	,278	,048	,295	5,752	,000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas (Y)

Berdasarkan nilai  $t_{hitung}$  dan nilai signifikansi dari output *SPSS* di atas, maka dapat di deskripsikan sebagai berikut:

**a. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan (X<sub>1</sub>) terhadap Akuntabilitas laporan Keuangan (Y)**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X<sub>1</sub>) diperoleh nilai  $t_{hitung} = 16,023$  dengan harga  $t_{tabel}$  pada  $df = n - k (52 - 3) = 49$  pada taraf signifikan 0.05 ialah sebesar 0,67953. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel} (16,023 > 0,67953)$  dan sig. Probabilitas  $0,00 < 0,05$ . Dengan demikian  $H_{01}$  diterima dan  $H_{a1}$  diterima, menjelaskan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan dari Aksesibilitas Laporan Keuangan (X<sub>2</sub>) terhadap Akuntabilitas laporan Keuangan (Y).

**b. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern (X<sub>2</sub>) terhadap Akuntabilitas laporan Keuangan (Y)**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern diperoleh nilai  $t_{hitung} = 5,752$  dengan harga  $t_{tabel}$  pada  $df = n - 3 (52 - 3) = 49$  pada taraf signifikan 0.05 ialah sebesar 0,67953. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel} (5,752 > 0,67953)$  dan sig. Probabilitas  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian  $H_{02}$  diterima dan  $H_{a2}$  diterima, menjelaskan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan dari dari Sistem Pengendalian Intern (X<sub>2</sub>) terhadap Akuntabilitas laporan Keuangan (Y).

## 2 Pengujian Hipotesis Simultan (Uji - F)

Untuk menguji pengaruh kedua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat maka digunakan uji F. Berdasarkan hasil pengujian statistik dengan menggunakan program *SPSS 20.00* dapat dilihat pada tabel 4.16.

**Tabel 4.15**  
**Hasil Perhitungan Uji Simultan F**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	592,632	2	296,316	176,317	,000 <sup>b</sup>
Residual	82,349	49	1,681		
Total	674,981	51			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas (Y)

b. Predictors: (Constant), SPI (X2), Aksesibilitas (X1)

Pengujian secara simultan (uji F) dilakukan dengan membandingkan  $F_{hitung}$  dan  $F_{tabel}$  dengan dk pembanding = k (jumlah variabel yang diteliti) dan dk penyebut = n-k-1 pada taraf signifikan 95% dan alpha 5%, yaitu dk pembilang = 2 dan dk penyebut = 48, maka diperoleh sebesar 3,19. Berdasarkan hasil analisis di atas. Diperoleh  $F_{hitung}$  = 176,317 dengan harga signifikan sebesar 0.000, dan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  (176,317 > 3,19) dan sig. Probabilitas 0,000 < 0,05.

Karena  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , dan harga signifikansi lebih besar dari alpha (0,000 < 0.05) berarti bahwa hipotesis diterima, sehingga ada pengaruh yang positif dan signifikan antara Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan di BPKA Kab. Deli Serdang.

### G. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat besarnya kontribusi variabel bebas Aksesibilitas Laporan Keuangan ( $X_1$ ), dan Sistem Pengendalian Intern ( $X_2$ ) secara bersama- sama terhadap variabel terikat yaitu Akuntabilitas Laporan Keuangan (Y). Perhitungan koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.16**  
**Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics	
					R Square Change	F Change
1	,937 <sup>a</sup>	,878	,873	1,296	,878	176,317

a. Predictors: (Constant), SPI (X2), Aksesibilitas (X1)

b. Dependent Variable: Akuntabilitas (Y)

Berdasarkan output diperoleh angka R *square* sebesar 0,878 atau 87,8%. Maka Aksesibilitas Laporan Keuangan ( $X_1$ ), dan Sistem Pengendalian Intern ( $X_2$ ) secara bersama-sama terhadap variabel terikat yaitu Akuntabilitas Laporan Keuangan (Y) yaitu sebesar 87,8% dan sisanya 12,2% Akuntabilitas Laporan Keuangan di BPKA. Kab. Deli Serdang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

### H. Pembahasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BPKA Kab. Deli Serdang, dimana dalam pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *total sampling*. Instrumen yang

digunakan adalah kuesioner terlebih dahulu diuji cobakan ke pegawai untuk mengetahui validitas dan reliabilitas item soal pada angket.

### **1. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan**

Aksesibilitas Laporan Keuangan merupakan Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Indikator Aksesibilitas Laporan Keuangan pada penelitian ini yaitu: Laporan keuangan dapat diakses, Laporan keuangan dipublikasikan melalui media umum.

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan regresi linear berganda di dapat persamaannya:  $Y = - 6,414 + 0,902 X_1 + 0,278 X_2$ . Persamaan ini menggambarkan bahwa Aksesibilitas Laporan Keuangan mempengaruhi Akuntabilitas Laporan Keuangan sebesar 0,902 (90,2%).

Analisis data untuk menguji hipotesis dengan uji t menunjukkan nilai (16,023 > 0,67953) dan sig. Probabilitas 0,00 < 0,05 maka hipotesis diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan ( $X_1$ ) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan di BPKA Kab. Deli Serdang sebesar 16,023.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Mulyana yang menyatakan bahwa: aksesibilitas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin baik aksesibilitas laporan keuangan sebuah SKPD maka akan semakin baik akuntabilitas laporan keuangan instansi tersebut. Hal ini karena jika suatu SKPD membuat laporan yang dapat

dipertanggungjawabkan dengan baik maka instansi tersebut memberikan keleluasaan bagi pihak-pihak yang ingin mengakses laporan pertanggung jawaban yang dibuatnya.

## **2 Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan**

Pengendalian intern merupakan salah satu fondasi terkuat *good governance*. Sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi pemerintah, dan menjamin pengamanan aset Negara. Indikator Sistem Pengendalian Intern dalam penelitian ini adalah: Integritas data, Ketepatan input dan posting data, Prosedur otorisasi dokumen transaksi, Tersimpannya dokumen sumber data, Pembagian tanggungjawab, Penentuan kebijakan dan standar akuntansi, Implementasi kebijakan dan standar.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hasil perhitungan dengan menggunakan regresi inear berganda di dapat persamaannya yaitu:  $Y = - 6,414 + 0,902 X_1 + 0,278 X_2$ . Persamaan ini menggambarkan bahwa Sistem Pengendalian Intern mempengaruhi Akuntabilitas Laporan Keuangan sebesar 0,278 (27,8%). Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern rendah, namun apabila Sistem Pengendalian Intern pegawai BPKA Kab. Deli Serdang lebih ditingkakan lagi dengan memperhatikan indikator-indikator di atas, maka prestasi belajar ekonomi siswa akan lebih meningkat.

Analisis data untuk menguji hipotesis dengan uji t menunjukkan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $5,752 > 0,67953$ ) dan sig. Probabilitas  $0,000 < 0,05$  maka hipotesis diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern ( $X_2$ ) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan di BPKA Kab. Deli Serdang sebesar 5,752.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008<sup>44</sup> pemerintah menetapkan adanya suatu sistem pengendalian intern yang harus dilaksanakan, baik pada tingkat pemerintah pusat ataupun daerah. Sistem pengendalian intern dimaksud adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien, serta pelaporan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

### **3. Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan**

Menurut LAN dalam Akuntabilitas dan *Good Governance*<sup>45</sup>, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui hasil uji koefisien regresi secara bersama-sama (uji F) diperoleh  $F_{hitung}$  sebesar 176,317 dan dibandingkan  $F_{tabel}$  dengan pembilang 2 dan dk penyebut = 48 dan pengambilan taraf nyata 5% maka

---

<sup>44</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. “*Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*”.

<sup>45</sup> LAN, “*Akuntabilitas dan Good Governance*”, Jakarta: Erlangga, 2000.



$F_{tabel} = 3,19$ . Dengan kata lain  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $176,317 > 3,19$ ) dan sig. Probabilitas  $0,000 < 0,05$ . Disimpulkan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan secara simultan antara Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan di BPKA Kab. Deli Serdang.

Hasil perhitungan dengan menggunakan regresi linear berganda di dapat persamaannya yaitu  $Y = - 6,414 + 0,902 X_1 + 0,278 X_2$ . Persamaan ini menggambarkan: jika Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern hasilnya tetap, maka Akuntabilitas Laporan Keuangan berkurang sebesar 6,414. Jika Aksesibilitas Laporan Keuangan mengalami kenaikan 1%, maka Akuntabilitas Laporan Keuangan akan mengalami peningkatan sebesar 90% satuan dengan asumsi variabel Sistem Pengendalian Intern bernilai tetap. Jika Sistem Pengendalian Intern mengalami kenaikan 1%, maka Akuntabilitas Laporan Keuangan akan mengalami peningkatan sebesar 28% satuan dengan asumsi variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan bernilai tetap.

Dari hasil penelitian dan pengolahan data bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel bebas, yaitu Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap variabel terikat Akuntabilitas Laporan Keuangan sebesar 87,8% dan sisanya 12,2% Akuntabilitas Laporan Keuangan di BPKA Kab. Deli Serdang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Hal ini sesuai dengan pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah pertanggungjawaban

pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut

1. Secara parsial Laporan Keuangan ( $X_1$ ) berpengaruh yang positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) dengan hasil  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $16,023 > 0,67953$ ) dan sig. Probabilitas  $0,00 < 0,05$  maka hipotesis diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan ( $X_1$ ) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan di BPKA Kab. Deli Serdang sebesar 16,023.

Hasil temuan dalam variabel Aksesibilitas laporan Keuangan ( $X_1$ ), indikator yang paling mempengaruhi variabel Akuntabilitas Laporan keuangan adalah indikator 2, yaitu Laporan keuangan dipublikasikan melalui media umum. Dengan kuisisioner no. 3 yaitu: Memberikan kemudahan akses laporan keuangan melalui media, surat kabar, radio, televisi, dan website (internet). Kuisisioner ini memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,62 sehingga dikategorikan sangat baik.

2. Secara parsial (Uji-t) Sistem Pengendalian Intern ( $X_2$ ) pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) dengan hasil  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $5,752 > 0,67953$ ) dan sig.

Probabilitas  $0,000 < 0,05$  maka hipotesis diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern ( $X_2$ ) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan di BPKA Kab. Deli Serdang sebesar 5,752.

Hasil temuan dalam variabel Sistem Pengendalian Intern ( $X_2$ ), indikator yang paling mempengaruhi variabel Akuntabilitas Laporan keuangan adalah indikator 3, yaitu Prosedur otorisasi dokumen transaksi. Dengan kuisisioner no. 6 yaitu: Setiap transaksi dan aktivitas ditempat saya bekerja telah didukung dengan otorisasi dari pihak yang berwenang. Kuisisioner ini memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,54 sehingga dikategorikan sangat baik.

3. Secara simultan Aksesibilitas Laporan Keuangan ( $X_1$ ) dan Sistem Pengendalian Intern ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan di BPKA Kab. Deli Serdang, dengan hasil  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $176,317 > 3,19$ ) dan sig. Probabilitas  $0,000 < 0,05$ . Hasil koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan hasil variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan ( $X_1$ ) dan Sistem Pengendalian Intern ( $X_2$ ) mempengaruhi variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di BPKA Kab. Deli Serdang sebesar 87,8%. Sisanya 12,2% di pengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pihak BPKA Kab. Deli Serdang, diharapkan untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat, dengan selalu mengupdate setiap perkembangan laporan keuangan di website BPKA Kab. Deli Serdang, sehingga masyarakat dapat melihat perkembangan laporan keuangan terbaru, dan memudahkan masyarakat mengakses informasi yang diperlukan. Dan berdampak baik bagi aksesibilitas laporan keuangan di badan tersebut.
2. Untuk sistem pengendalian intern diharapkan pimpinan BPKA Kab. Deli Serdang lebih meningkatkan manajemen terhadap resiko di lingkungan kerja, dan pengawasan kinerja terhadap pegawai BPKA khususnya di bagian pencatatan akuntansi keuangan. Sehingga tercipta lingkungan kerja yang sehat.
3. Bagi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap dinas-dinas dalam pembuatan laporan keuangan yang baik dan benar, dan memberikan pengawasan yang diberikan dinas-dinas pemerintahan kepada masyarakat agar sesuai dengan UU yang berlaku, serta menyediakan wadah informasi pelayanan publik berupa: memberikan sosialisasi perkembangan informasi kepada masyarakat, adanya ruang saran dan kritik dari masyarakat kepada dinas terkait agar adanya perbaikan ke arah yang lebih baik.

4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan pertimbangan selanjutnya dengan data dan sampel dengan rentan waktu yang lebih panjang dari penelitian ini. Kemudian juga perlu adanya penelitian lanjutan yang mengungkap faktor-faktor lain yang mempengaruhi rentabilitas selain efisiensi pengendalian biaya dan perputaran modal kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, Siti dan Aida Nahar, 2012, *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara*, *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Volume 8/No. 2/Mei 2012: 97-189
- Arikunto, Suharsimi. (2013). "*Prosedur Penelitian*", Jakarta: Rhineka Cipta.
- Asfiryati, D. (2017). *Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel intervening (studi pada SKPD Kota Dumai)*. JOM Fekon, Vol.4 No.1
- Choirunisah, Fariziah. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Yang Dihasilkan Sistem Akuntansi Instansi (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Malang Tahun 2008)*. <http://www.google.com>.
- Dwiky Guntara, Muhammad Irwan Padli Nasution, dan Adnan Buyung Nasution. (2020). *Implementasi Metode Economic Order Quantity Pada Aplikasi Pengendalian Bahan Produksi Sandal Mirado*. *Jurnal Teknik Informatika* Vol. 13 No. 1.
- Fauziyah, Miftahul Reza. (2017). *Pengaruh Penyajian dan aksesibilitas Laporan keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* (6).
- Ghozali, I. (2006). *Statistik non-parametrik, teori dan aplikasi dengan program. SPSS* Semarang: Universitas Diponegoro.
- Guntara, Dwiky, Muhammad Irwan Padli Nasution. (2020). *Implementasi Metode Economic Order Quantity Pada Aplikasi Pengendalian Bahan Produksi Sandal Mirado*. *Jurnal Teknik Informatika*, vol 13, no: 1 pp.31-42.
- Halim, Abdul. (2006) *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2007). "*akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*" Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Henley, D. A, Likierman. J. Perrin, M. Svans, I. Lapsley, & J. Whiteoak. (1992). *Public Sector Accounting and Financial Control Fourth Edition*. Chapman & Hall.
- <http://www.bpkriau.go.id>), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Kabupaten Indragiri

- Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo. 2008. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Illir)*. Kumpulan Makalah Simposium Nasional Akuntansi XI. 23-24 Juli. Pontianak.
- Indriantoro, N dan Supomo, B (2002). *Metodologi penelitian bisnis: untuk akuntansi dan manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Krismiaji. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*. In Edisi keempat.
- M. I. P. Nasution, N. Nurbaiti, N. Nurlaila, T. I. F. Rahma and K. Kamila. "Face Recognition Login Authentication For Digital Payment Solution at COVID-19 Panemic", 2020 3rd Internasional Conference on Computer and Informatic Engineering (IC2IE), Yogyakarta, 2020, pp. 48-51, doi: 10.1109/IC2IE50715.9274654.
- Nasution, Muhammad Irwan Padli. (2012). *Sistem Informasi Pengontrolan Mutu Produk Pada PT. SC Johnson Manufacturing Medan*. Seminar Nasional Informatika 2012 (SNIF-2012).
- Nasution, Muhammad Irwan Padli. (2014). *Keunggulan Kompetitif dengan Teknologi Informasi*. Jurnal Elektronik.
- LAN. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: C.V ANDI.
- Mardiasmo. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Edisi Pertama Penerbit Andi. h.20
- Mulyana, Budi. (2006). *Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*", Jurnal Akuntansi Pemerintah.
- Mustofa, Anies Iqbal. (2012). *Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang*. Accounting Analysis Journal, 1(1), h.1-6
- Nugraha, Darya Setya dan Apriyanti Susanti, 2010, *The Influence of Internal Control System to The Reliability of Local Government Financial Statement (Case Study at Pemerintah Provinsi Jawa Barat)*, Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi, Vol. 2 No. 2



- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Primayana, (2014). *Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Manfaat Teknologi Informasi, Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng)*. E-Jurnal S1 AK Universitas Pendidikan Ganesha, 2(1), h.1-12.
- Purnomo, D. A. B. dan B. S. (2014). “*Pengaruh sistem pengendalian intern dan kekuatan koersif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi pada PEmerintah Daerah Kabupaten/ Kota di wilayah I Bogor Provinsi Jawa Barat)*”, Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, Vol.2, hlmm 276–288.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 *tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Rohman, Abdul, 2009, *Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 9 No. 1. Universitas Diponegoro Semarang
- Samudra Lubis, Muhammad Irwan Padli Nasution, Sekolah Tinggi Teknik Harapan Medan, IAIN Sumatera Utara Medan.(2012). *Sistem Informasi Pengontrolan Mutu Produk Pada PT SC Johnson Manufacturing Medan*. Seminar Nasional Informatika
- Sande, P. (2013). *Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (studi empiris pada pemerintah provinsi sumatra barat)*. Artikel Skripsi. Universitas Negeri Padang, Padang.
- Shende, Suresh dan Tony Bennet. (2004). *Concept Paper 2: Transparency and Accountability in Public Financial Administration*. UN DESA.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sudjana. (2008). *Metoda Statistika*”, Bandung: PT. Tarsito Bandung.
- Wahyuni, Putu Sri, Sulindawati (2014). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung*. Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 2 No. 1
- Winidyaningrum, C., dan Rahmawati. 2010. *Pengaruh Sumberdaya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian, Intern Akuntansi*. SNA XIII Purwokerto
- Yani, Ahmad. (2009). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Kuisiener Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Sistem Pengendalian Intern, dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Keterangan	(STS) Sangat Tidak Setuju	(TS) Tidak Setuju	(N) Netral	(S) Setuju	(SS) Sangat Setuju
Skor	1	2	3	4	5

#### Kuisiener Aksesibilitas Laporan Keuangan (X1)

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
1.	Informasi dalam laporan keuangan disajikan dengan jujur dan dengan terbuka (tidak ada yang ditutupi).					
2.	Menyajikan laporan keuangan secara lengkap					
3	Memberikan kemudahan akses laporan keuangan melalui media, surat kabar, radio, televise, dan website (internet).					
4.	Semua stakeholder (Masyarakat, pemerintah pusat, dan pihak yang berkepentingan) dapat mengakses laporan keuangan.					
5.	Laporan keuangan menghasilkan informasi yang lengkap mencakup semua informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan.					
6.	Informasi keuangan yang disajikan dapat dipahami oleh pengguna.					
7.	Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (website)					
8.	Penyajian laporan keuangan yang diberikan sesuai peraturan yang berlaku					
9.	Adanya ruang akses masyarakat untuk memberikan saran, dan kritik atas hasil laporan keuangan					
10.	Adanya sosialisasi instansi yang terkait secara langsung kepada masyarakat yang terkait mengenai penjelasan laporan keuangan yang dihasilkan					

### Kuisisioner Sistem Pengendalian Intern (X2)

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
<b>Lingkungan Pengendalian</b>						
1.	Instansi/Lembaga tempat saya bekerja telah menerapkan kode etik secara tertulis.					
2.	Pimpinan Instansi/Lembaga ditempat saya bekerja telah memberikan contoh dalam berperilaku mengikuti kode etik.					
<b>Penilaian Resiko</b>						
3.	Ditempat saya bekerja telah menerapkan pengendalian intern dan manajemen terhadap resiko.					
4.	Ditempat saya bekerja telah menerapkan penentuan batas dan penentuan Toleransi					
<b>Kegiatan Pengendalian</b>						
5.	Ditempat saya bekerja telah menerapkan pemisahan tugas yang memadai					
6.	Setiap transaksi dan aktivitas ditempat saya bekerja telah didukung dengan otorisasi dari pihak yang berwenang.					
<b>Informasi dan Komunikasi</b>						
7.	Dalam waktu yang tidak ditentukan pimpinan melakukan pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi					
8.	Ditempat saya bekerja telah menerapkan sistem informasi untuk melaksanakan tanggungjawab.					
<b>Pemantauan</b>						
9.	Ditempat saya bekerja telah melaksanakan sistem akuntansi yang memungkinkan audit.					
10.	Adanya pengawasan secara rutin di tempat saya bekerja mengenai kinerja yang dikerjakan.					

### Kuisisioner Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
1.	Proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan sudah dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan Masyarakat.					
2.	Saya bekerja berdasarkan pedoman mengenai proses akuntansi yang telah ada.					
3.	Pengelolaan keuangan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.					
4.	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan telah menggambarkan dengan jujur transaksi yang seharusnya terjadi.					
5.	Proses pertanggungjawaban dilakukan secara terbuka, cepat dan tepat.					
6.	Ketersediaan/ keterbukaan ruang akses yang memadai dapat membantu dalam pengambilan keputusan secara cepat, tepat dan akurat.					
7.	Laporan keuangan yang disusun dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.					
8.	Adanya proses monitoring kinerja dan evaluasi manajemen dalam organisasi.					
9.	Laporan Penggunaan Anggaran disajikan secara terbuka, cepat dan tepat kepada seluruh masyarakat.					
10.	Penyajian laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi kinerja sekaligus menjadi bukti pertanggungjawaban.					

**Lampiran 2****Hasil Output Uji Validitas Aksesibilitas Laporan Keuangan**

<b>No. Item</b>	<b>r<sub>hitung</sub></b>	<b>r<sub>tabel</sub></b>	<b>Keterangan</b>
1	0,679	0,2262	Valid
2	0,496	0,2262	Valid
3	0,504	0,2262	Valid
4	0,324	0,2262	Valid
5	0,701	0,2262	Valid
6	0,512	0,2262	Valid
7	0,448	0,2262	Valid
8	0,701	0,2262	Valid
9	0,405	0,2262	Valid
10	0,531	0,2262	valid

**Lampiran 3****Hasil Output Uji Validitas Sistem Pengendalian Intern**

<b>No. Item</b>	<b>r<sub>hitung</sub></b>	<b>r<sub>tabel</sub></b>	<b>Keterangan</b>
1	0,658	0,2262	Valid
2	0,531	0,2262	Valid
3	0,637	0,2262	Valid
4	0,346	0,2262	Valid
5	0,681	0,2262	Valid
6	0,374	0,2262	Valid
7	0,667	0,2262	Valid
8	0,607	0,2262	Valid
9	0,549	0,2262	Valid
10	0,643	0,2262	valid

**Lampiran 4****Hasil Output Uji Validitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

<b>No. Item</b>	<b>r<sub>hitung</sub></b>	<b>r<sub>tabel</sub></b>	<b>Keterangan</b>
1	0,509	0,2262	Valid
2	0,675	0,2262	Valid
3	0,675	0,2262	Valid
4	0,591	0,2262	Valid
5	0,656	0,2262	Valid
6	0,578	0,2262	Valid
7	0,542	0,2262	Valid
8	0,509	0,2262	Valid
9	0,435	0,2262	Valid
10	0,519	0,2262	valid



**Lampiran 5****Hasil Output Uji Reliabilitas Aksesibilitas Laporan Keuangan****Reliability Statistics**

<b>Cronbach's Alpha</b>	<b>N of Items</b>
,717	10

**Lampiran 6****Hasil Output Uji Reliabilitas Sistem Pengendalian Intern****Reliability Statistics**

<b>Cronbach's Alpha</b>	<b>N of Items</b>
,761	10

**Lampiran 7****Hasil Output Uji Reliabilitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah****Reliability Statistics**

<b>Cronbach's Alpha</b>	<b>N of Items</b>
,767	10

## LAMPIRAN 8

**REKAPITULASI DATA KUISINER  
AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN ( X<sub>1</sub> )**

NO	NAMA PEGAWAI	NO ITEM SOAL										JUMLAH
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Drs. Agus. M.Si	2	5	4	5	2	5	5	2	2	2	34
2	Ricky Supriady, SE	2	5	4	5	2	5	4	2	3	2	34
3	Masril, S.Sos. M.Si	2	5	5	4	2	4	5	2	3	1	33
4	Ulpa Chairani Nasution, SE	2	4	4	4	2	4	5	2	1	2	30
5	Daryanto	2	5	5	5	2	5	5	2	2	2	35
6	Amran Gunawan Siregar	3	3	4	3	3	4	4	3	2	2	31
7	Andri Taruna Siregar	2	3	3	5	2	4	3	2	1	2	27
8	Aulia Ahmad Siregar	3	4	3	4	3	4	3	3	1	2	30
9	Dessy Zulviani P, SE, M.Si	2	4	4	5	2	4	5	2	1	2	31
10	Delismawati Harahap, S.Sos	1	4	4	4	1	4	4	1	2	1	26
11	Jumiati Addha, SE	2	5	4	5	2	5	4	2	1	2	32
12	Ernawati, SE	3	4	5	5	3	5	5	3	1	1	35
13	Mislina	1	4	5	5	1	5	4	1	1	1	28
14	Baginda Thomas Harahap, SH	2	5	4	3	2	5	4	2	2	2	31
15	Hendri Adi Wijaya, SE, MM	3	4	5	5	3	5	4	3	2	3	37
16	Warni	2	4	4	5	2	5	4	2	2	2	32
17	Eddy Hermawan, SE, MM	1	4	4	4	1	3	4	1	1	1	24
18	Johan Arifin Nasution, SE	2	4	4	5	2	4	5	2	1	2	31
19	Dippos Martono Silitonga, S.Kom	3	5	5	5	3	4	5	3	2	3	38
20	Mahmudin Siregar, S.Sos, MM	2	5	4	5	2	5	5	2	2	2	34
21	Hj.Maulina Sari Siregar, S.Sos	2	5	4	4	2	5	4	2	3	2	33
22	Ida Laila	2	5	5	5	2	4	5	2	3	1	34
23	Rahmad Fauzi, SE	2	4	4	5	2	4	5	2	1	2	31
24	Zahara, S.Sos	2	5	5	5	2	5	5	2	2	2	35
25	Nurul FadillahSyam Sipahutar, SE	3	3	4	5	3	4	4	3	2	2	33
26	Musdariansyah, SE,M.Si	2	3	3	5	2	4	3	2	1	2	27
27	Desi Indra Sari Kesuma, SH, MM	3	4	3	4	3	4	3	3	1	2	30
28	Teti Asnani, S.Sos	2	4	4	5	2	4	5	2	1	2	31
29	Ida Hanum, S.Sos	1	4	4	4	1	4	4	1	2	1	26
30	Martini, A.Md	2	5	4	5	2	5	4	2	2	2	33
31	Nur Iqzah Harahap, A.Md	3	5	5	4	3	5	5	3	2	1	36
32	Surya Darma	1	4	5	5	1	5	4	1	2	1	29
33	Syafrizal, SE	2	5	4	5	2	3	4	2	2	2	31
34	T. Mahriani Elysa	3	4	5	5	3	5	4	3	2	3	37
35	Fansuri Fadil Qahar, A.Md	2	5	4	5	2	5	4	2	1	2	32
36	Inna Rozanna	1	4	4	4	1	3	4	1	1	1	24
37	Jaharuddin	2	5	4	4	2	4	5	2	1	2	31
38	Nurhanifah Sitanggang	3	5	5	5	3	4	5	3	2	3	38
39	Yessika Floriana Manalu, A.Md	2	5	4	4	2	5	5	2	2	2	33
40	Misida Nova Sari Br Marpaung	2	5	4	5	2	5	4	2	3	2	34
41	Hj. Khadijah Siregar, SE	1	5	5	4	2	4	5	2	3	1	32

42	Dina Afrina Sari Purba, SE	2	4	4	4	2	4	5	2	2	2	31
43	Wamilda, Amd	2	5	5	5	2	5	5	2	2	2	35
44	Arfian Yamin Ginting, SE, M.Si	3	5	4	5	3	4	4	3	2	2	35
45	Rosdiah, S.Sos	2	5	3	5	2	4	3	2	2	2	30
46	Ariandi Sasmita, SE	3	4	3	5	3	4	3	3	1	2	31
47	H.Syarifuddin Lubis, SE	2	4	4	5	2	4	5	2	1	2	31
48	M. Husni Tamrin, S.Kom	1	4	4	4	1	4	4	1	2	1	26
49	Asni Hidayati Simanjuntak	2	5	4	5	2	5	4	2	2	2	33
50	Syafitriyani Lubis,ST, MM	3	4	5	4	3	5	5	3	2	1	35
51	Hj. Nurleliwati Siregar, S.Sos	1	4	5	5	1	5	4	1	2	1	29
52	Suharti Ningsih, S.Sos	2	5	4	5	2	5	4	2	1	2	32

## LAMPIRAN 9

**REKAPITULASI DATA KUISINER  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN ( X<sub>2</sub> )**

NO	NAMA PEGAWAI	NO ITEM SOAL										JUMLAH
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Drs. Agus. M.Si	5	2	1	2	2	3	2	5	5	4	31
2	Ricky Supriady, SE	5	3	2	1	3	4	3	5	5	5	36
3	Masril, S.Sos. M.Si	5	2	2	1	2	5	1	5	4	3	30
4	Ulpa Chairani Nasution, SE	4	2	1	2	2	4	2	4	5	5	31
5	Daryanto	5	3	3	1	3	5	1	5	5	5	36
6	Amran Gunawan Siregar	3	1	1	1	2	4	1	3	3	3	22
7	Andri Taruna Siregar	3	2	3	1	3	5	2	3	5	4	31
8	Aulia Ahmad Siregar	4	3	2	2	2	4	1	4	3	4	29
9	Dessy Zulviani P, SE, M.Si	4	2	2	1	2	5	1	4	4	4	29
10	Delismawati Harahap, S.Sos	4	2	2	1	2	3	1	4	5	4	28
11	Jumiati Addha, SE	5	2	3	1	3	5	3	5	5	4	36
12	Ernawati, SE	4	2	2	3	1	5	1	4	4	4	30
13	Mislina	4	3	2	1	2	5	2	4	5	4	32
14	Baginda Thomas Harahap, SH	5	3	3	3	3	5	3	5	4	5	39
15	Hendri Adi Wijaya, SE, MM	4	2	2	1	2	5	2	4	5	5	32
16	Warni	4	2	1	1	1	5	2	4	3	5	28
17	Eddy Hermawan, SE, MM	4	2	2	1	2	5	2	4	4	5	31
18	Johan Arifin Nasution, SE	4	2	2	3	3	5	2	4	5	5	35
19	Dippos Martono Silitonga, S.Kom	5	1	2	1	3	5	2	5	5	5	34
20	Mahmudin Siregar, S.Sos, MM	5	2	1	2	2	3	2	5	5	4	31
21	Hj.Maulina Sari Siregar, S.Sos	5	3	2	1	3	4	3	5	5	5	36
22	Ida Laila	5	2	2	1	2	5	1	5	4	3	30
23	Rahmad Fauzi, SE	4	2	1	2	2	4	2	4	5	5	31
24	Zahara, S.Sos	5	3	3	1	3	5	1	5	5	5	36
25	Nurul FadillahSyam Sipahutar, SE	3	1	1	1	2	4	1	3	3	3	22
26	Musdariansyah, SE,M.Si	3	2	3	1	3	5	2	3	5	4	31
27	Desi Indra Sari Kesuma, SH, MM	4	3	2	2	2	4	1	4	3	4	29
28	Teti Asnani, S.Sos	4	2	2	1	2	5	1	4	4	4	29
29	Ida Hanum, S.Sos	4	2	2	1	2	3	1	4	5	4	28
30	Martini, A.Md	5	2	3	1	3	5	3	5	5	4	36
31	Nur Iqzah Harahap, A.Md	4	2	2	3	1	5	1	5	4	4	31
32	Surya Darma	4	3	2	2	2	5	2	4	5	4	33
33	Syafrizal, SE	5	3	3	2	3	5	3	5	4	5	38
34	T. Mahriani Elysa	4	2	2	2	2	5	2	4	5	5	33
35	Fansuri Fadil Qahar, A.Md	4	2	1	1	1	5	2	5	3	5	29
36	Inna Rozanna	4	2	2	1	2	5	2	4	4	5	31
37	Jaharuddin	4	2	2	3	3	5	2	5	5	5	36
38	Nurhanifah Sitanggang	5	1	2	2	3	5	2	5	5	5	35
39	Yessika Floriana Manalu, A.Md	5	2	1	2	2	3	2	5	5	4	31
40	Misida Nova Sari Br Marpaung	5	3	2	2	3	4	3	5	5	5	37
41	Hj. Khadijah Siregar, SE	5	2	2	2	2	5	1	5	4	3	31

42	Dina Afrina Sari Purba, SE	4	2	1	2	2	4	2	4	5	5	31
43	Wamilda, Amd	5	3	3	2	3	5	1	5	5	5	37
44	Arfian Yamin Ginting, SE, M.Si	3	1	1	1	2	4	1	5	3	3	24
45	Rosdiah, S.Sos	3	2	3	2	3	5	2	5	5	4	34
46	Ariandi Sasmita, SE	4	3	2	2	2	4	1	4	3	4	29
47	H.Syarifuddin Lubis, SE	4	2	2	1	2	3	1	4	4	4	27
48	M. Husni Tamrin, S.Kom	4	2	2	1	2	3	1	4	5	4	28
49	Asni Hidayati Simanjuntak	5	2	3	1	3	3	3	5	5	4	34
50	Syafitriyani Lubis,ST, MM	4	2	2	3	1	5	1	4	4	4	30
51	Hj. Nurleliwati Siregar, S.Sos	4	3	2	1	2	3	2	4	5	4	30
52	Suharti Ningsih, S.Sos	5	3	3	3	3	5	3	5	4	5	39

## LAMPIRAN 10

**REKAPITULASI DATA KUISIONER  
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ( Y )**

NO	NAMA PEGAWAI	NO ITEM SOAL										JUMLAH
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Drs. Agus. M.Si	2	5	5	4	2	5	5	2	1	2	33
2	Ricky Supriady, SE	2	5	5	4	2	5	4	2	2	2	33
3	Masril, S.Sos. M.Si	2	5	5	5	2	4	5	2	2	1	33
4	Ulpa Chairani Nasution, SE	2	4	4	4	2	4	5	2	1	2	30
5	Daryanto	2	5	5	5	2	5	5	2	2	1	34
6	Amran Gunawan Siregar	3	3	3	4	3	4	4	3	1	1	29
7	Andri Taruna Siregar	2	3	3	3	2	4	3	2	2	1	25
8	Aulia Ahmad Siregar	3	4	4	3	1	4	3	3	1	2	28
9	Dessy Zulviani P, SE, M.Si	2	4	4	4	2	4	5	2	1	2	30
10	Delismawati Harahap, S.Sos	1	4	4	4	1	4	4	1	1	1	25
11	Jumiati Addha, SE	2	5	5	4	2	5	4	2	3	2	34
12	Ernawati, SE	3	4	4	5	3	5	5	3	2	1	35
13	Mislina	1	4	4	5	1	5	4	1	2	1	28
14	Baginda Thomas Harahap, SH	2	5	5	4	2	5	4	2	3	2	34
15	Hendri Adi Wijaya, SE, MM	3	4	4	5	3	5	4	3	2	3	36
16	Warni	2	4	4	4	2	5	4	2	1	2	30
17	Eddy Hermawan, SE, MM	1	4	4	4	1	3	4	1	2	1	25
18	Johan Arifin Nasution, SE	2	4	4	4	2	4	5	2	2	2	31
19	Dippos Martono Silitonga, S.Kom	3	5	5	5	3	4	5	3	2	3	38
20	Mahmudin Siregar, S.Sos, MM	2	5	5	4	2	5	5	2	1	2	33
21	Hj.Maulina Sari Siregar, S.Sos	2	5	5	4	2	5	4	2	2	2	33
22	Ida Laila	2	5	5	5	2	4	5	2	2	1	33
23	Rahmad Fauzi, SE	2	4	4	4	2	4	5	2	1	2	30
24	Zahara, S.Sos	2	5	5	5	2	5	5	2	2	1	34
25	Nurul FadillahSyam Sipahutar, SE	3	3	3	4	3	4	4	3	1	1	29
26	Musdariansyah, SE,M.Si	2	3	3	3	2	4	3	2	2	1	25
27	Desi Indra Sari Kesuma, SH, MM	3	4	4	3	1	4	3	3	1	2	28
28	Teti Asnani, S.Sos	2	4	4	4	2	4	5	2	1	2	30
29	Ida Hanum, S.Sos	1	4	4	4	1	4	4	1	1	1	25
30	Martini, A.Md	2	5	5	4	2	5	4	2	3	2	34
31	Nur Iqzah Harahap, A.Md	3	4	4	5	3	5	5	3	2	1	35
32	Surya Darma	1	4	4	5	1	5	4	1	2	1	28
33	Syafrizal, SE	2	5	5	4	2	5	4	2	3	2	34
34	T. Mahriani Elysa	3	4	4	5	3	5	4	3	2	3	36
35	Fansuri Fadil Qahar, A.Md	2	4	4	4	2	5	4	2	1	2	30
36	Inna Rozanna	1	4	4	4	1	3	4	1	2	1	25
37	Jaharuddin	2	4	4	4	2	4	5	2	2	2	31
38	Nurhanifah Sitanggang	3	5	5	5	3	4	5	3	2	3	38
39	Yessika Floriana Manalu, A.Md	2	5	5	4	2	5	5	2	1	2	33
40	Misida Nova Sari Br Marpaung	2	5	5	4	2	5	4	2	2	2	33



41	Hj. Khadijah Siregar, SE	2	5	5	5	2	4	5	2	2	1	33
42	Dina Afrina Sari Purba, SE	2	4	4	4	2	4	5	2	1	2	30
43	Wamilda, Amd	2	5	5	5	2	5	5	2	2	1	34
44	Arfian Yamin Ginting, SE, M.Si	3	3	3	4	3	4	4	3	1	1	29
45	Rosdiah, S.Sos	2	3	3	3	2	4	3	2	2	1	25
46	Ariandi Sasmita, SE	3	4	4	3	1	4	3	3	1	2	28
47	H.Syarifuddin Lubis, SE	2	4	4	4	2	4	5	2	1	2	30
48	M. Husni Tamrin, S.Kom	1	4	4	4	1	4	4	1	1	1	25
49	Asni Hidayati Simanjuntak	2	5	5	4	2	5	4	2	3	2	34
50	Syafitriyani Lubis,ST, MM	3	4	4	5	3	5	5	3	2	1	35
51	Hj. Nurleliwati Siregar, S.Sos	1	4	4	5	1	5	4	1	2	1	28
52	Suharti Ningsih, S.Sos	2	5	5	4	2	5	4	2	3	2	34

## Lampiran 11

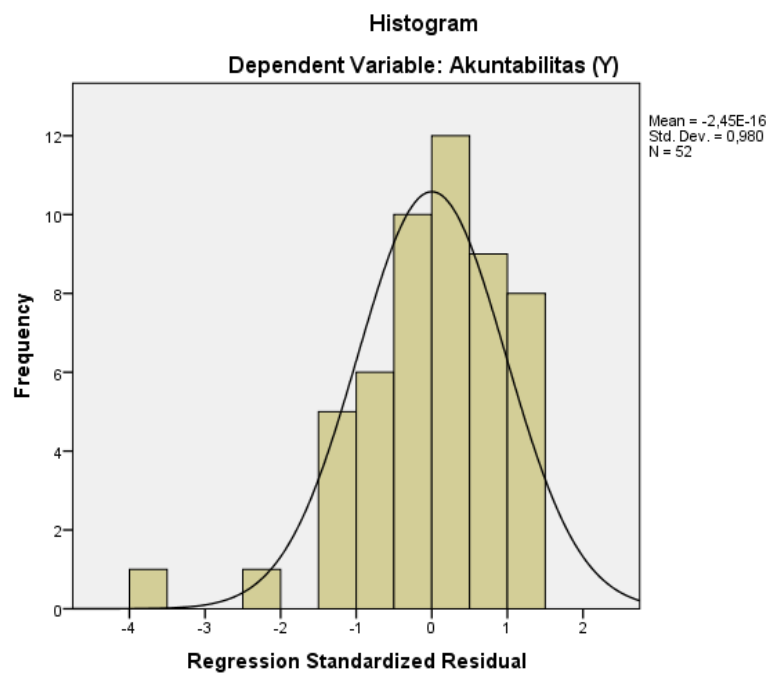
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov – Smirnov**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		52
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1,27070120
Most Extreme Differences	Absolute Positive	,101
	Negative	-,101
Kolmogorov-Smirnov Z		,730
Asymp. Sig. (2-tailed)		,660

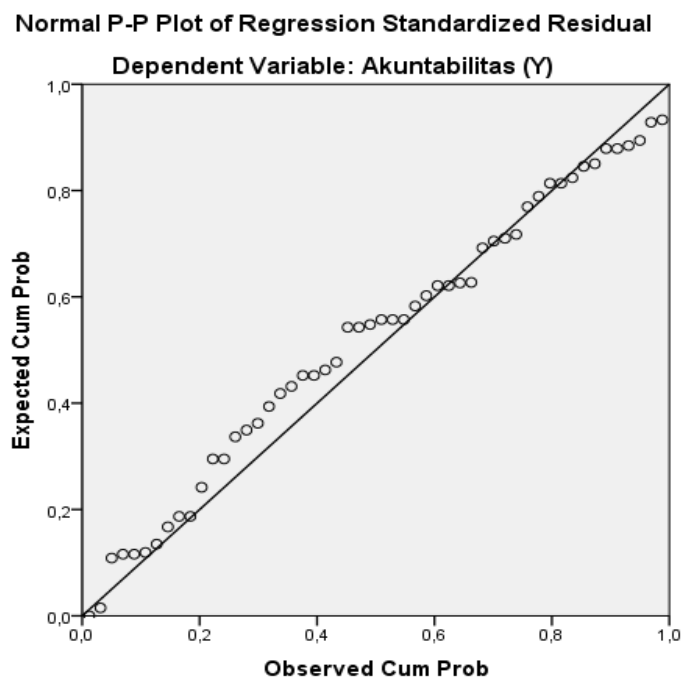
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

## Lampiran 12

**Hasil Uji Normalitas Histogram Residual**

## Lampiran 13

**Hasil Uji Normalitas Probability Plot**

## Lampiran 14

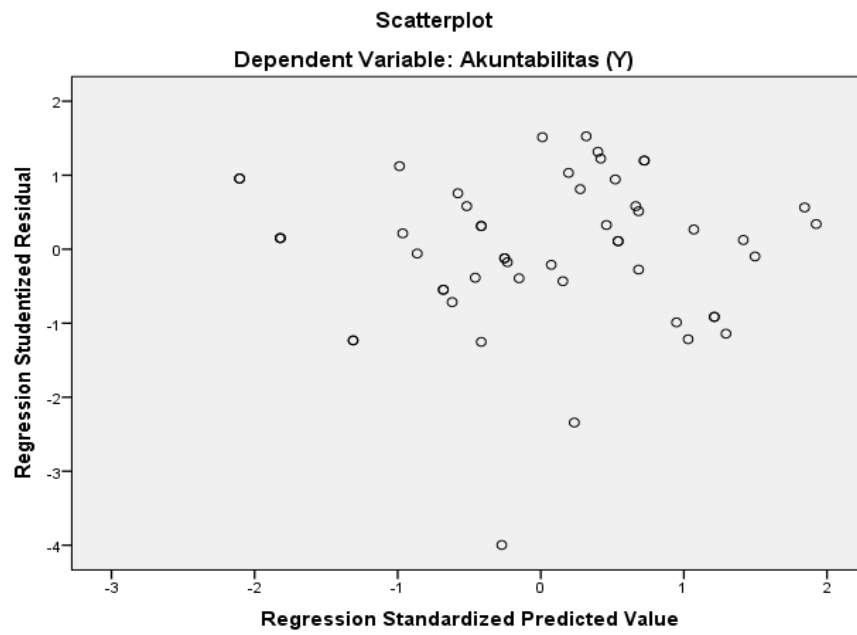
**Hasil Uji Multikolinearitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-6,414	2,069		-3,100	,003		
1 Aksesibilitas (X1)	,902	,056	,823	16,023	,000	,945	1,058
SPI (X2)	,278	,048	,295	5,752	,000	,945	1,058

a. Dependent Variable: Akuntabilitas (Y)

## Lampiran 15

**Hasil Uji Heterokedastisitas Scatterplot**

## Lampiran 16

**Hasil Uji regresi linear berganda****Coefficientsa**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6,414	2,069		-3,100	,003
	Aksesibilitas (X1)	,902	,056	,823	16,023	,000
	SPI (X2)	,278	,048	,295	5,752	,000

## Lampiran 17

**Hasil Uji Parsial (Uji-t)****Coefficients**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6,414	2,069		-3,100	,003
	Aksesibilitas (X1)	,902	,056	,823	16,023	,000
	SPI (X2)	,278	,048	,295	5,752	,000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas (Y)



**Lampiran 18****Hasil Uji Simultan (Uji-F)**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	592,632	2	296,316	176,317	,000 <sup>b</sup>
Residual	82,349	49	1,681		
Total	674,981	51			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas (Y)

b. Predictors: (Constant), SPI (X2), Aksesibilitas (X1)

## Lampiran 19

### Hasil Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ )

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics	
					R Square Change	F Change
1	,937 <sup>a</sup>	,878	,873	1,296	,878	176,317

a. Predictors: (Constant), SPI (X2), Aksesibilitas (X1)

b. Dependent Variable: Akuntabilitas (Y)

## Lampiran 20

## DOKUMENTASI PENELITIAN









**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 JL. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371 Telp. (061) 6615683 – 6622925  
 Fax. (061) 6615683 Email : febi@iainsu.ac.id

Nomor : B-3367/EB I/PP.00.9/01/2020  
 Sifat : Penting  
 Lamp : 1 (satu) berkas  
 Perihal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

31 Agustus 2020

Yth,  
**1. Irwan Pady Nasution, MM, M. Kom**  
**2. Rahmat Daim Harahap, M. Ak**  
 Dosen Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU  
 Medan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, dengan ini menunjuk saudara sebagai pembimbing skripsi terhadap mahasiswa:

Nama : **Rita Agustina. Pasaribu**  
 NIM : 502162084  
 Jurusan : Akuntansi Syariah

adalah benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, sedang dalam menyelesaikan skripsi dengan judul:


"Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Deli serdang"

Selanjutnya kami mengharapkan kesediaan saudara:

1. **Irwan Pady Nasution, MM, M. Kom** untuk menjadi Pembimbing I, dengan tugas utama meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Hipotesis, Tujuan Penelitian, Landasan Teoritis, Pembahasan dan Hasil Penelitian, Daftar Isi, Daftar Kepustakaan.
2. **Rahmat Daim Harahap, M. Ak** untuk menjadi Pembimbing II, dengan tugas utama meliputi Sampul Depan Skripsi, Halaman Dalam Skripsi, Lembar Pengasahan, Abstraksi, Kata Pengantar, Metode Penelitian, Kajian Terdahulu, Penggunaan Bahasa yang efektif, Teknik Penulisan dan Tanda Baca

Bersama ini kami lampirkan Proposal Penelitian Skripsi tersebut untuk dikoreksi sebagaimana mestinya.

Demikian kami sampaikan untuk dipedomani, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Wassalam  
 Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan  
  
**D. Muhammad Yafiz, MA**  
 NIP. 19760423 200312 1 001

Tembusan  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET**  
 JL. MAWAR NO. 8 TEL : (061) 7952370 FAX : (061) 7956076  
 LUBUK PAKAM - 20514

Lubuk Pakam, 15 Juni 2020

Nomor : 070/213  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : Izin Melaksanakan Penelitian/Riset

Kepada Yth :  
 Bapak/Ibu Dekan Fakultas  
 Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Universitas Islam Negeri  
 Sumatera Utara  
 Di-

Medan

1. Sesuai dengan Rekomendasi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 070/1164/BPDS/2020 Tanggal 15 Juni 2020 perihal Rekomendasi/Izin Melaksanakan Penelitian/Riset/KKN dalam rangka penyelesaian program pendidikan pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang selama **1 (satu) Bulan**.

2. Dengan ini diberitahukan bahwa kami tidak keberatan dan dapat menyetujui Permohonan Penelitian/Riset di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang, yang akan dilaksanakan oleh :

Nama	: Rita Agustina Pasaribu
Alamat	: Jl. Bunga Wijaya Gg. Bersama No. 7/3 Lk.-VI
NIM/NIP/KTP	: 1271216008980004
Pekerjaan	: Mahasiswa
Jurusan	: Akuntansi Syariah
Judul	: Pengaruh Akseibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang)
Penanggung Jawab	: Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag

3. Demikian disampaikan untuk bahan seperlunya.

An. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
 DAN ASET KABUPATEN DELI SERDANG



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Deli Serdang sebagai laporan
2. Yang bersangkutan
3. Peringgal



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET**  
 JL. MAWAR NO. 8 TEL : (061) 7952370 FAX : (061) 7956076  
 LUBUK PAKAM - 20514

Lubuk Pakam, 15 Agustus 2020

Nomor : 070/ 285  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran :-  
 Perihal : Surat Keterangan Selesai Riset

Kepada Yth :  
 Bapak/Ibu Wakil Dekan Bidang  
 Akademik dan Kelembagaan  
 Universitas Islam Negeri  
 Sumatera Utara  
 Di-  
 Medan

Dengan Hormat,

Bersama ini kami terangkan bahwa :

Nama : **Rita Agustina Pasaribu**  
 Alamat : Jl. Bunga Wijaya Gg. Bersama No. 7/3 Lk.-VI  
 NIM/NIP/KTP : 1271216008980004  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Jurusan : Akuntansi Syariah  
 Judul : Pengaruh Aksebilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang)

Penanggung Jawab : Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag

Mahasiswa tersebut di atas telah selesai melaksanakan Riset di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang selama 2 (dua) bulan.

Demikian untuk diketahui sebagai bahan seperlunya.

An. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
 DAN ASET KABUPATEN DELI SERDANG



RICKY SUPRIADY, SE  
 REKOR BINA TK.I  
 NIP. 19691022 199803 1 006



Medan, 5 Juni 2020

Kepada Yth

Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di Tempat

Hal : Pengumuman Ujian Komprehensif

### SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :Hendra Harmain.S.E .M.Pd.

NIM :197305100319981003.

Jabatan: Ketua Prodi Akuntansi Syariah

Dengan ini menerangkan Bahwa nama nama yang di bawah ini

1. Rita Agustina Pasaribu (0502162084)

2. Nanta Afsyari Pohan (0502161014)

3. Yolanda Pratiwi (0502162134)

4. Triani (0502161002)

5. Nuraina Izzatin (0502162090)

6. Atika Khairani (0502163158)

Telah lulus ujian Komprehensif yang di laksanakan pada tanggal 18 Mei 2020

Demikianlah surat Keterangan ini dibuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya

Wassalam



Hendra Harmain.S.E. M.Pd

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS PRIBADI**

Nama : Rita Agustina Pasaribu

Nim : 0502162084

Tpt/Tgl Lahir : Medan, 18 Agustus 1998

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Bunga wijaya kesuma gg. Bersama no. 7, kel. Padang  
bulan selayang II

### **II. RIWAYAT PENDIDIKAN**

Tamatan MI Negeri Tanjung Sari Medan Berijazah Tahun 2010

Tamatan MTs Negeri 1 Medan Berijazah Tahun 2013

Tamatan SMA Negeri 13 Medan Berijazah Tahun 2016

Tamatan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Berijazah tahun 2021

